

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kualitas SDM masih menghadapi tantangan serius, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif tertinggal dibanding wilayah lain, (BPS 2024). IPM sebagai indikator komposit yang mencerminkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, menjadi alat penting dalam mengukur dan membandingkan kualitas SDM secara kuantitatif dan komparatif. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan melalui mekanisme desentralisasi fiskal, namun ketimpangan antar daerah, keterbatasan infrastruktur dasar, dan rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal seharusnya tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah dalam sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan SDM, (Paddu, 2024).

Dalam konteks makroekonomi, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan SDM. Dua dimensi utama yang menjadi sorotan adalah fiskal stres dan ketergantungan fiskal. Fiskal stres

ninkan tekanan anggaran yang dialami oleh pemerintah daerah akibat
eimbangan antara penerimaan daerah dan belanja, sedangkan



ketergantungan fiskal mengindikasikan dominasi dana transfer pusat dibanding pendapatan yang dapat menurunkan insentif daerah untuk mengembangkan kapasitas fiskalnya sendiri (Oates, 1972; Rodden dkk., 2003). Ketika tekanan fiskal meningkat dan ketergantungan fiskal tinggi, belanja pembangunan strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja cenderung ditekan, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas SDM.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sepanjang 2010-2023, rata-rata provinsi di KTI seperti Papua, NTT, dan Maluku mengalami kondisi fiskal yang kurang sehat, ditandai PAD rendah dan porsi belanja tinggi dalam APBD. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan *mandatory spending* 20%, realisasinya di sejumlah daerah masih rendah akibat keterbatasan kapasitas fiskal dan prioritas belanja yang cenderung operasional. Pola serupa tampak pada sektor kesehatan di beberapa daerah, alokasinya belum mencapai 10% dari APBD dan realisasinya kerap tertunda atau tidak optimal (BPS, 2023; DJPK Kemenkeu, 2022). Kondisi ini kian diperberat oleh lemahnya tata kelola fiskal serta minimnya investasi swasta di sektor produktif yang berdampak langsung pada kualitas SDM.

Sekalipun banyak daerah KTI mengalami fiskal stres PAD terbatas dan porsi belanja tinggi, pengalaman program nasional menunjukkan bahwa transfer terarah (DAK fisik dan non fisik, BOS, BOK, JKN dan dana desa) tetap mampu memperbaiki indikator pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan rancangan penelitian, ekspektasi ini menempatkan pengaruh fiskal terhadap IPM bersifat negatif (*ceteris paribus*). Namun, pola yang terlihat pada data dapat bervariasi karena perbedaan kapasitas kelembagaan, desain program yang *earmarked* ranan dasar, serta jeda realisasi dampak (*policy lag*), sehingga temuan



jangka pendek tidak selalu merefleksikan efek strukturalnya. Bagian berikut menguraikan variabel kontrol dan dinamika makro KTI sebagai pijakan analitis.

Variabel kontrol seperti inflasi dan upah riil juga memainkan peran penting dalam menentukan daya beli masyarakat dan insentif ekonomi. Secara teori, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli dan menghambat konsumsi pendidikan atau kesehatan, (Friedman, 1995a; Phelps, 1970a), sementara upah riil yang meningkat seharusnya mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, (Becker, 1993). Namun, di KTI, fenomena tingginya inflasi yang bersifat struktural serta terbatasnya daya beli yang tercermin dari variasi upah riil berdasarkan upah minimum menyebabkan teori-teori tersebut tidak sepenuhnya terkonfirmasi dalam praktiknya, (Kiha dkk., 2021a).

Lebih lanjut, jika upah riil dianalisis dari perspektif penawaran agregat (*aggregate supply*), maka kenaikan upah riil dapat berdampak negatif terhadap perekonomian dalam kondisi tertentu. Dalam kerangka ini, kenaikan upah riil meningkatkan biaya produksi bagi sektor usaha, terutama di pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel dan belum efisien. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja, menunda investasi, atau bahkan melakukan substitusi modal terhadap tenaga kerja. Efek ini sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja yang menyatakan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja bersifat negatif terhadap tingkat upah riil (Borjas & Van Ours, 2010). Dalam kondisi ekonomi dengan elastisitas tenaga kerja yang rendah seperti KTI, kenaikan upah cenderung menurunkan kesempatan kerja dan memperlemah efek distribusi pendapatan terhadap konsumsi produktif, sehingga tidak mendorong kualitas SDM secara efektif.



seperti yang dijelaskan dalam studi (O. Blanchard & Sheen, 2013; 2011) kenaikan upah riil yang tidak disertai dengan peningkatan

produktivitas akan menurunkan *output* jangka pendek dan mengganggu keseimbangan pasar tenaga kerja, terutama dalam sistem ekonomi yang masih rapuh. Di KTI, kenaikan upah riil tidak mendorong investasi pada modal manusia, karena sektor informal tetap dominan, dan insentif untuk mengalokasikan pendapatan tambahan pada pendidikan atau kesehatan masih rendah.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, kualitas SDM diakui sebagai salah satu faktor kunci yang menentukan daya saing dan kemajuan suatu wilayah. Seiring dengan itu, muncul kesadaran bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh sektor pendidikan dan kesehatan semata, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi makroekonomi dan kebijakan fiskal yang mendasarinya.

Teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990) dan teori modal manusia (Becker, 1964) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, serta pelatihan kerja merupakan bentuk akumulasi modal manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pencapaian kualitas SDM juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah untuk mendanai layanan publik, kondisi iklim investasi, serta dinamika pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kerangka pemikiran ini juga sejalan dengan pandangan *New Keynesian Economics*, yang menyoroti pentingnya peran intervensi fiskal dalam mengatasi kegagalan pasar dan ketidakseimbangan permintaan agregat. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, belanja publik strategis cenderung ditekan, sehingga jalur-jalur ekonomi yang seharusnya mendukung pembangunan manusia menjadi kurang efektif. Di sisi lain, New Keynesian juga menjelaskan adanya kekakuan

an upah (*stickiness*), serta inefisiensi pasar tenaga kerja yang sering i wilayah dengan dominasi sektor informal, seperti di KTI.



Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana variabel fiskal seperti fiskal stres dan ketergantungan fiskal berdampak terhadap kualitas SDM, baik secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung seperti investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjawab tantangan utama pembangunan manusia di wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal yang rendah dan struktur ekonomi yang belum inklusif.

Sejumlah kajian empiris mendukung asumsi ini. Misalnya, studi oleh (Duflo & Banerjee, 2011a) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang sukses dari sisi layanan dasar menciptakan modal manusia yang lebih sehat dan cerdas, yang merupakan prasyarat utama agar sektor swasta mau berinvestasi lebih jauh di sektor ekonomi produktif. Studi lain menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tanpa diiringi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat memperlemah hasil di sektor pendidikan dan kesehatan. Kapasitas fiskal yang rendah, ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat, serta keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas desentralisasi fiskal dalam meningkatkan layanan publik, (Nazikha & Rahmawati, 2021). Di Indonesia, laporan World Bank (2020) juga mencatat bahwa efisiensi anggaran daerah sangat berkorelasi dengan capaian pembangunan SDM, terutama di wilayah-wilayah tertinggal seperti KTI.

Sejak diberlakukan pada awal tahun 2001, desentralisasi fiskal telah membuka ruang bagi daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Namun tanpa penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas belanja, desentralisasi belum mampu secara konsisten meningkatkan kualitas SDM, terutama di daerah

al seperti KTI. Tantangan terbesar tetap pada kesenjangan fiskal antar



daerah dan rendahnya efisiensi serta efektivitas alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam dua dekade sejak zaman reformasi bergulir, data IPM menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di KTI yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di KBI. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja produktif di KTI, yang berdampak pada rendahnya kualitas SDM di wilayah tersebut. Padahal menurut (Becker, 1993) peningkatan kualitas SDM memerlukan investasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengalaman kerja. Kualitas SDM juga berkaitan dengan daya saing dan produktivitas ekonomi suatu wilayah, yang berpengaruh langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Angka indeks pembangunan manusia di KBI berada pada angka rata-rata 72,98 sedikit lebih tinggi dari angka nasional, sementara indeks pembangunan manusia di KTI berada pada angka rata-rata 68,39 di bawah angka nasional, (BPS Indonesia, 2024). Walaupun angka IPM menunjukkan tren meningkat secara terus menerus tetapi menjadi tidak ada artinya jika melihat bahwa sebelas provinsi di KTI mendominasi menjadi yang terendah untuk Indonesia. Meskipun desentralisasi fiskal ditujukan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi disparitas pembangunan SDM KTI, sebagaimana dicita-citakan dalam agenda reformasi.

Pendekatan ekonomi makro memberikan kerangka kerja penting untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kualitas SDM di KTI.

Pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, alokasi anggaran pemerintah,

i dalam infrastruktur sosial, serta akses terhadap layanan dasar adalah faktor kunci yang berkontribusi terhadap pembangunan SDM. Selain itu,



ketergantungan KTI pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi. Hal ini menyebabkan terbatasnya diversifikasi pekerjaan yang berkualitas tinggi, yang selanjutnya memengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, analisis makroekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal memengaruhi peningkatan kualitas SDM di kawasan ini.

Beberapa faktor ekonomi makro memainkan peran krusial dalam pembentukan kualitas SDM di KTI. Dalam teori pertumbuhan endogen dikatakan bahwa faktor SDM memainkan peran penting sebagai faktor internal dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara melalui investasi strategis dan kebijakan yang inovatif. Hal ini bertolak belakang dengan teori pertumbuhan eksogen yang menempatkan sumber daya manusia sebagai eksternal bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari sisi kebijakan ekonomi, teori eksogen mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak terbatas pada tingkat pertumbuhan jangka panjang. Setelah ekonomi mencapai tingkat teknologi tertentu, pertumbuhan akan stabil pada *steady state*. Sementara teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa kebijakan pemerintah memainkan peran besar dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang, misalnya melalui subsidi untuk penelitian, investasi pendidikan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kontroversi ini pada dasarnya mencerminkan perbedaan pandangan tentang sejauh mana pemerintah seharusnya campur tangan dalam perekonomian. Pilihan strategi anggaran sering kali bergantung pada kondisi ekonomi, ideologi politik, dan kebutuhan masyarakat.



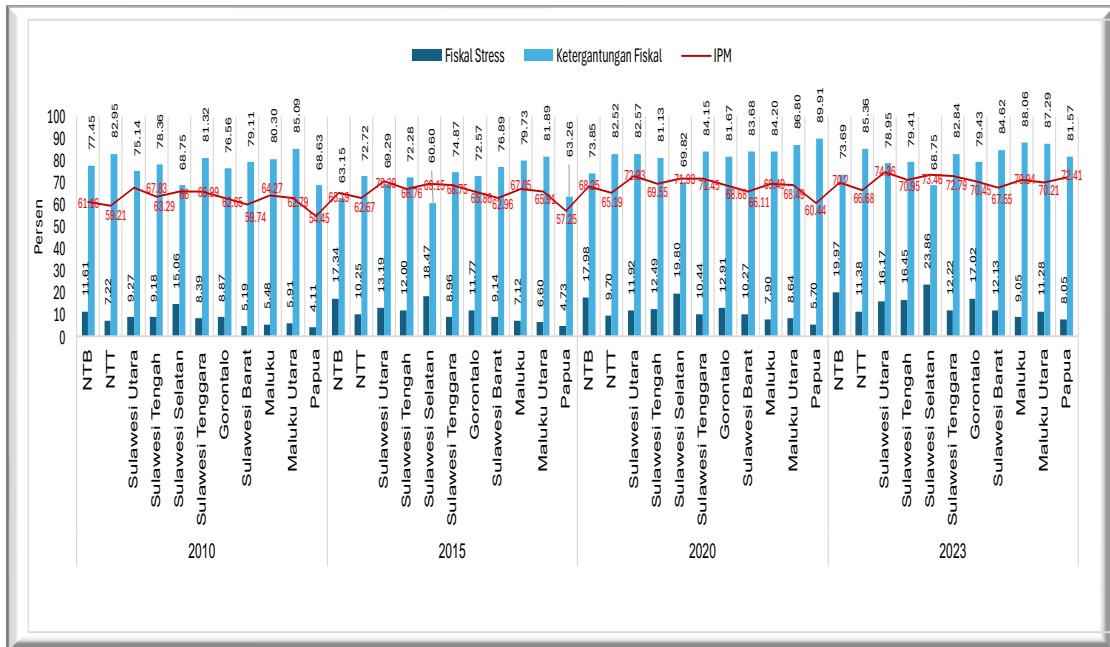
Penyelarasan laju pertumbuhan antar daerah dalam implementasi otonomi yang riil, searah dan intens serta bertanggung jawab dalam satu kawasan

nusantara telah diamanatkan oleh undang-undang. Kebijakan ekonomi makro yang diimplementasikan pada daerah-daerah tersebut salah satunya adalah kebijakan fiskal dalam hal penetapan dan penggunaan anggaran yang diterapkan haruslah tepat, efektif dan efisien dalam rangka menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah pada kawasan tersebut. Peran fiskal sangat penting demi menunjang pembangunan di suatu daerah. Dalam pandangannya Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan sasaran untuk mencapai stabilitas makroekonomi, pengurangan ketergantungan pada bantuan luar negeri serta pemerataan pendapatan antar golongan, yaitu melalui instrumen pajak dan subsidi, (Hill, 2001), dengan begitu Keynes mengharapkan bahwa bila terjadi peningkatan belanja pemerintah, hendaknya dapat mendorong naiknya tingkat permintaan agregat menyusul naiknya angka produksi dari barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami peningkatan, (Qadri dkk., 2022). Desentralisasi fiskal yang sudah menjadi wewenang daerah sepenuhnya dalam hal pengelolaan hendaknya dapat diimplementasikan secara utuh terhadap faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas SDM. Tercapainya tujuan pembangunan terhadap peningkatan kualitas SDM yang tercermin pada IPM sebagai tolok ukur sangat tergantung kepada pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang, (Harliyani & Haryadi, 2016).

Berbagai intervensi dalam teori ekonomi makro sudah dilakukan, tetapi dalam hal ini, instrumen yang digunakan dalam teori ekonomi makro untuk melakukan perbaikan terhadap ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah adalah kebijakan fiskal khususnya desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal di daerah variabel utama memainkan peran penting dalam mendukung



pembangunan SDM melalui alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.



Sumber: Djpk Kementerian Keuangan RI & BPS (2025), Data Diolah

Gambar 1. 1 Fiskal Stres, Ketergantungan Fiskal dan IPM Menurut Provinsi Di KTI Tahun 2010-2023

Pada Gambar 1.1. di atas dinamika fiskal dan pembangunan manusia di KTI selama periode 2010 hingga 2023 menunjukkan kompleksitas hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan capaian IPM. Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1 di atas, selama 2010-2023, fiskal stres dan ketergantungan fiskal tetap menjadi ciri utama provinsi di KTI, namun capaian IPM menunjukkan tren peningkatan di semua daerah. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara menonjol sebagai provinsi dengan fiskal lebih baik ditandai PAD lebih besar, fiskal stres rendah, dan ketergantungan fiskal moderat sehingga mampu mencatat IPM tertinggi, masing-masing mencapai angka indeks 79,2 dan 79,4 pada 2023. Fakta akan pandangan (Oates, 1972) bahwa desentralisasi fiskal akan lebih



efektif jika pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan lokal secara efisien dan akuntabel.

Sebaliknya, provinsi lain seperti NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara tetap bergantung pada transfer pusat dengan ketergantungan di atas 80%, namun IPM tetap meningkat moderat. Papua mencatat peningkatan IPM signifikan dari 54,5 pada 2010 menjadi 71,5 pada 2023, tetapi tetap terendah di KTI karena ketergantungan fiskal ekstrem dan lemahnya tata kelola. Dengan demikian dapat tetap terlihat ketimpangan spasial dalam kualitas SDM yang tercermin dari perbedaan IPM antar provinsi di KTI. Menurut (Lewis & Smoke, 2017) disparitas ini sering kali mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal riil (*real fiscal capacity*) dan ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan dengan desain transfer fiskal antar pemerintah.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar provinsi di KTI mengalami peningkatan IPM secara bertahap, namun peningkatan tersebut tidak selalu linear dengan penurunan ketergantungan fiskal. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal bukan satu-satunya determinan capaian pembangunan manusia, melainkan tergantung pula pada efektivitas tata kelola anggaran dan karakteristik struktural ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal tanpa kapasitas kelembagaan dan manajerial yang memadai tidak serta merta meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi pada IPM (Bird & Smart, 2002; Martinez-Vazquez & McNab, 2003).

Secara konseptual, hasil ini memperkuat pendekatan teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990) yang menekankan pentingnya investasi berkelanjutan dalam modal manusia sebagai motor pertumbuhan jangka panjang. Dalam

ni, meskipun dana transfer dari pusat melimpah, tanpa kebijakan fiskal yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja



maka pertumbuhan IPM tidak akan optimal, (Paddu, 2017). Oleh karena itu, reformasi fiskal berbasis efisiensi alokasi dan tata kelola diperlukan untuk memastikan bahwa belanja publik benar-benar berdampak terhadap pembangunan SDM.

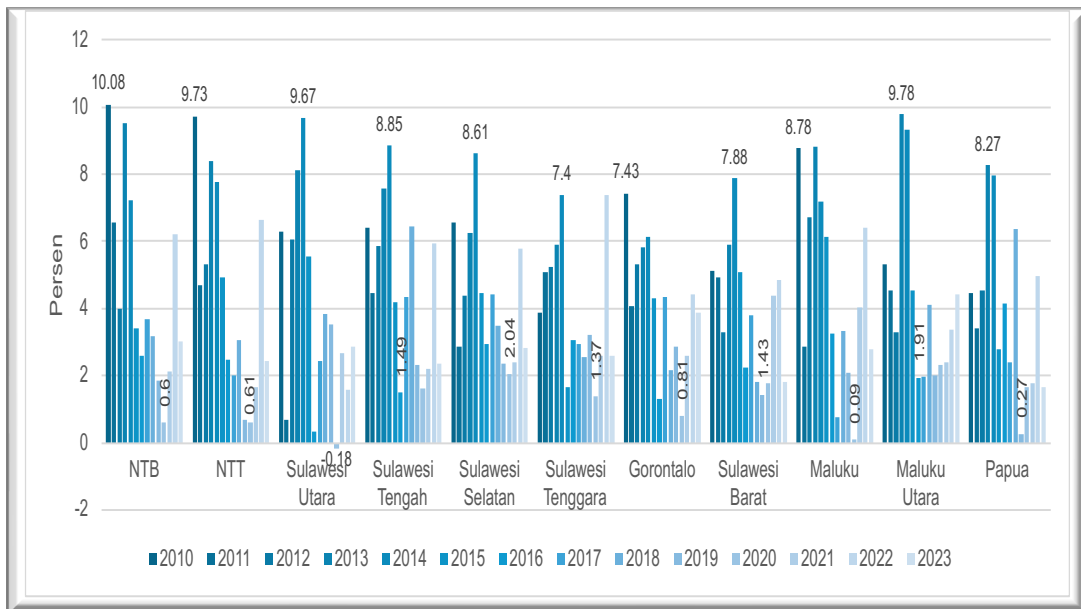
Meskipun transfer fiskal di KTI relatif besar, peningkatan IPM tidak menunjukkan lonjakan berarti, dengan rata-rata kenaikan hanya sekitar satu persen per tahun. Bahkan penurunan pada tahun 2014 lebih disebabkan oleh perubahan metode perhitungan IPM oleh BPS, bukan penurunan kualitas SDM yang substantif. Fenomena ini menimbulkan paradoks fiskal, di mana belanja publik tinggi tetapi *outcome* pembangunan manusia tetap lambat. Dalam perspektif *Second Generation Fiscal Federalism* (Oates, 1999), kondisi ini menegaskan bahwa kualitas institusi dan tata kelola lebih menentukan efektivitas belanja publik daripada sekadar besarnya ruang fiskal. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara *input* fiskal dan capaian pembangunan manusia di KTI menjadi isu penting sekaligus relevan untuk diajukan sebagai pertanyaan penelitian.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kualitas SDM ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh variabel ekonomi makro lainnya seperti inflasi, upah riil, investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi turut mempengaruhi dinamika pembangunan SDM di KTI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan beban fiskal pemerintah daerah, terutama ketika harga kebutuhan pokok dan biaya layanan meningkat. Namun, dalam konteks KTI, hasil empiris menunjukkan bahwa inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap IPM, terutama karena struktur ekonomi di wilayah ini yang didominasi sektor primer dan

Sektor-sektor ini cenderung lebih fleksibel dalam merespons fluktuasi
n banyak di antaranya menerima subsidi dari pemerintah pusat. Hal ini



selaras dengan pandangan (Friedman, 1995a; Phelps, 1970a) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, inflasi tidak dapat secara permanen menurunkan pengangguran atau meningkatkan *output* riil. Dengan adanya intervensi fiskal



Sumber: BPS (2025), Data Diolah

Gambar 1. 2 Inflasi Menurut Provinsi di KTI Tahun 2010-2023

Pada Gambar 1.2 di atas menggambarkan bagaimana pola inflasi di KTI sepanjang 2010-2023 yang rentan dan fluktuatif. Provinsi kepulauan seperti NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua lebih sering mengalami lonjakan inflasi hingga di atas 8-10% akibat keterbatasan produksi lokal dan tingginya biaya distribusi antar wilayah, sedangkan provinsi daratan Sulawesi relatif lebih stabil karena Sulsel berperan sebagai pusat perdagangan dan logistik regional. Fenomena volatilitas ekstrem, seperti deflasi di Sulawesi Utara pada tahun 2014 atau inflasi sangat rendah di Maluku pada tahun 2022, menunjukkan lemahnya ketahanan ekonomi regional terhadap guncangan eksternal. Dalam kerangka *New*



n Economics (Mankiw, 1985; Clarida et al., 1999), rigiditas harga dan membuat inflasi yang berkejang menurunkan daya beli dan memperlambat

penyesuaian pasar tenaga kerja, sehingga berimplikasi negatif terhadap konsumsi pendidikan dan kesehatan rumah tangga.

Lebih lanjut, pandangan *New Keynesian* menekankan pentingnya ekspektasi inflasi dan peran kredibilitas kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi yang bersifat *transitory* atau sementara dan tidak mengganggu ekspektasi jangka panjang, cenderung tidak merusak keputusan investasi jangka panjang di sektor pendidikan atau kesehatan. Ini menjelaskan mengapa dalam beberapa periode, meskipun terjadi lonjakan inflasi, investasi dalam pembangunan manusia tetap berlangsung, khususnya ketika ada dukungan kebijakan *counter-cyclical*.

Dalam kajian empiris oleh (Kiha dkk., 2021a) dijelaskan bahwa hubungan antara inflasi dan IPM di Indonesia Timur tidak signifikan secara statistik, baik secara langsung maupun melalui jalur pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperkuat argumen bahwa dalam konteks desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal daerah yang rendah, dampak inflasi terhadap kualitas SDM sangat ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan kelembagaan lokal.

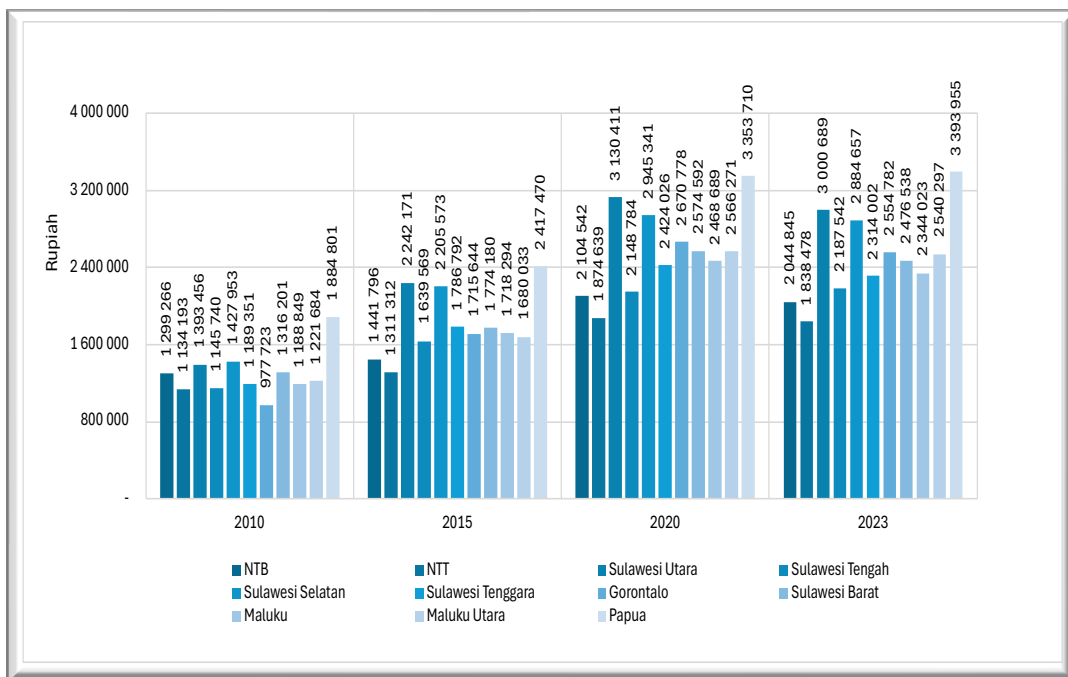
Dengan demikian, dari perspektif *New Keynesian*, ketiadaan pengaruh inflasi terhadap kualitas SDM di KTI dapat dipahami sebagai hasil dari kebijakan stabilisasi yang berhasil meminimalkan rigiditas harga dan distribusi efek inflasi secara merata. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh kestabilan harga, tetapi oleh keberlanjutan investasi sosial dan respons fiskal yang adaptif terhadap fluktuasi ekonom

Dari perspektif *structuralist* (Prebisch, 1950; Furtado, 1970), kerentanan inflasi di KTI juga mencerminkan ketergantungan struktural pada distribusi barang wilayah serta lemahnya basis produksi lokal. Kondisi ini menegaskan erbaikan infrastruktur logistik, diversifikasi produksi pangan, dan tata



kelola fiskal adaptif merupakan prasyarat penting agar inflasi tidak menjadi penghambat pembangunan kualitas SDM di KTI.

Mengingat kompleksitas hubungan antara inflasi dan kualitas SDM di KTI, penting untuk meninjau peran upah riil sebagai indikator daya beli tenaga kerja dalam mengakses layanan dasar. Meskipun inflasi berpotensi menekan kesejahteraan, upah riil mencerminkan kompensasi riil yang diterima setelah memperhitungkan harga, sehingga menjadi variabel penting dalam pembangunan manusia. Namun, seperti halnya inflasi, upah riil di KTI belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut terkait struktur pasar tenaga kerja dan mekanisme pengupahan.



Sumber: (BPS 2024), Data Diolah

Gambar 1. 3 Upah Riil Menurut Provinsi Di KTI Tahun 2010-

Perkembangan upah riil di KTI selama periode 2010-2023 seperti kan pada Gambar 1.3 di atas menunjukkan tren peningkatan yang i di seluruh provinsi, meskipun dengan tingkat capaian yang berbeda-



beda. Papua secara konsisten menempati posisi tertinggi, di mana upah riil meningkat dari Rp. 1,88 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 3,39 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pendapatan secara nominal yang dikoreksi dengan inflasi yang disesuaikan dengan harga dasar tahun 2018 sebagai dasar penggunaan indeks harga konsumen (IHK). Namun demikian, jika dikaitkan dengan kualitas SDM, yang diukur melalui IPM tampak adanya ketidaksesuaian. Misalnya, meskipun Papua memiliki upah riil tertinggi, provinsi ini justru mencatatkan IPM terendah di kawasan. Sebaliknya, provinsi seperti Sulut atau Sulsel dengan upah riil lebih rendah memiliki IPM yang lebih tinggi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya upah riil tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas SDM, terutama di daerah dengan karakteristik struktural seperti Papua, Maluku, atau NTT. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Human Capital (Becker, 1964), yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah penentu utama kualitas SDM, bukan semata besarnya pendapatan. Jika pendapatan tidak diikuti dengan pengeluaran produktif pada layanan dasar dan peningkatan keterampilan, maka dampaknya terhadap SDM akan terbatas.

Dari sudut pandang New Keynesian, khususnya melalui konsep *stickiness* dalam pasar tenaga kerja, terlihat bahwa struktur pengupahan di sektor formal di Papua yang relatif tinggi belum mencerminkan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara luas. Ini terjadi karena sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal atau ekstraktif yang tidak berkontribusi besar terhadap peningkatan kompetensi SDM secara menyeluruh. Selain itu, pasar kerja yang tersegmentasi dan kurangnya linkage antara industri dan pendidikan juga membuat kenaikan *w* secara otomatis mendorong peningkatan kualitas modal manusia.



Berbagai kajian menunjukkan bahwa upah riil atau upah minimum tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam konteks wilayah dengan keterbatasan struktural. Dampak upah terhadap pembangunan manusia lebih rendah di wilayah timur dibanding wilayah barat karena perbedaan infrastruktur dan layanan dasar, (Rahman dkk., 2022). Demikian juga upah tidak signifikan terhadap peningkatan IPM, di mana akses terhadap pendidikan dan kesehatan atau infrastruktur sosial lebih menentukan (Osakede dkk., 2023; Taioka & Bittes Terra, 2025). Selain itu, dalam kondisi ketimpangan tinggi, peningkatan upah belum tentu diikuti oleh peningkatan investasi pendidikan, terutama jika akses ke pembiayaan pendidikan terbatas, (Galor & Zeira, 1993).

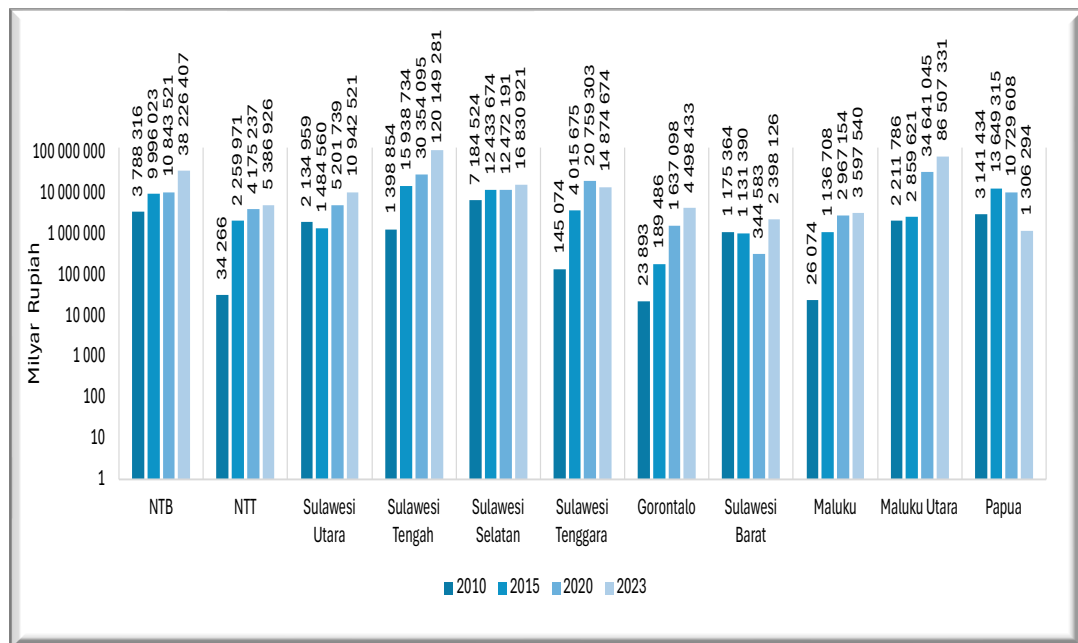
Dengan demikian, grafik ini menegaskan bahwa meskipun upah riil meningkat, tidak ada jaminan otomatis terhadap peningkatan kualitas SDM, kecuali didukung oleh tata kelola fiskal yang efektif, sistem pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal. Strategi pembangunan di KTI harus berorientasi pada pemberdayaan manusia, bukan hanya peningkatan pendapatan nominal.

Dampak kebijakan ekonomi makro tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga dari aspek investasi, tenaga kerja, dan kualitas SDM. Meski kebijakan makroekonomi sering dirancang untuk tujuan besar seperti stabilitas fiskal dan moneter, pelaksanaannya memiliki efek langsung maupun tidak langsung pada elemen-elemen mikro seperti investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan kualitas SDM. Kebijakan ekonomi makro yang diterapkan di KTI pada periode

3 secara implisit menggambarkan keadaan dari sisi investasi swasta, dan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi tekanan anggaran yang



tinggi, serta tren inflasi yang fluktuatif berimplikasi negatif terhadap minat investor dalam melakukan investasi, (Messakh dkk., 2019).



Sumber: BPS (2025), Data Diolah

Gambar 1. 4 Investasi Swasta Menurut Provinsi Di KTI Tahun 2010-2023

Gambar 1.4 di atas menampilkan perkembangan realisasi investasi swasta di provinsi-provinsi KTI dari tahun 2010 hingga 2023. Terlihat bahwa investasi meningkat signifikan di beberapa provinsi, terutama di Sulawesi Tengah yang melonjak drastis mencapai 71 triliun rupiah pada 2022, disusul oleh Maluku Utara 52 triliun rupiah pada 2023 dan NTB 35 triliun rupiah pada 2023. Sementara itu, sebagian besar provinsi lainnya, termasuk Papua, Maluku, dan NTT, memperlihatkan tren investasi yang cenderung stagnan atau meningkat sangat perlahan dalam satu dekade terakhir.

Jika nilai investasi ini dikaitkan dengan kualitas SDM dalam hal ini IPM, dapat terlihat adanya ketimpangan. Provinsi dengan investasi tinggi seperti tengah dan Maluku Utara belum tentu mencatatkan IPM tertinggi di



kawasan, begitu pula sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya investasi swasta tidak serta-merta berkorelasi langsung dengan kualitas SDM tanpa melihat struktur dan sektor investasinya.

Menurut teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990), investasi swasta yang produktif berperan besar dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama jika diarahkan pada sektor-sektor yang memperkuat kapasitas manusia, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan kesehatan. Namun, di KTI, investasi yang tumbuh pesat cenderung terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan industri berat, yang padat modal tetapi minim transfer keterampilan atau teknologi kepada tenaga kerja lokal. Ini selaras dengan hasil kajian empiris UNDP dan Bappenas (2020) yang menemukan bahwa di wilayah timur Indonesia, investasi belum terintegrasi dengan pembangunan manusia karena rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dan lemahnya linkage antar sektor.

Selain itu, teori *Human Capital* (Becker, 1993) menekankan bahwa kualitas SDM meningkat ketika ada investasi langsung dalam pendidikan dan kesehatan. Investasi swasta dapat mendukungnya bila diarahkan ke sektor sosial dan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Namun, sebagian besar investasi di KTI bersifat eksploitatif, dan tanpa kolaborasi lintas sektor, maka dampaknya terhadap IPM akan terbatas. Dalam beberapa kajian empiris juga menyoroti pentingnya *investment quality*, bukan hanya kuantitas. Investasi yang tidak meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau tidak menciptakan lapangan kerja berkualitas cenderung gagal meningkatkan indikator pembangunan manusia, (Dabla-Norris & Srivisal, 2013).

Di KTI, banyak daerah masih menghadapi keterbatasan dalam literasi infrastruktur pendidikan, dan akses kesehatan dasar yang membuat sulit terkonversi menjadi modal sosial dan peningkatan IPM. Papua,

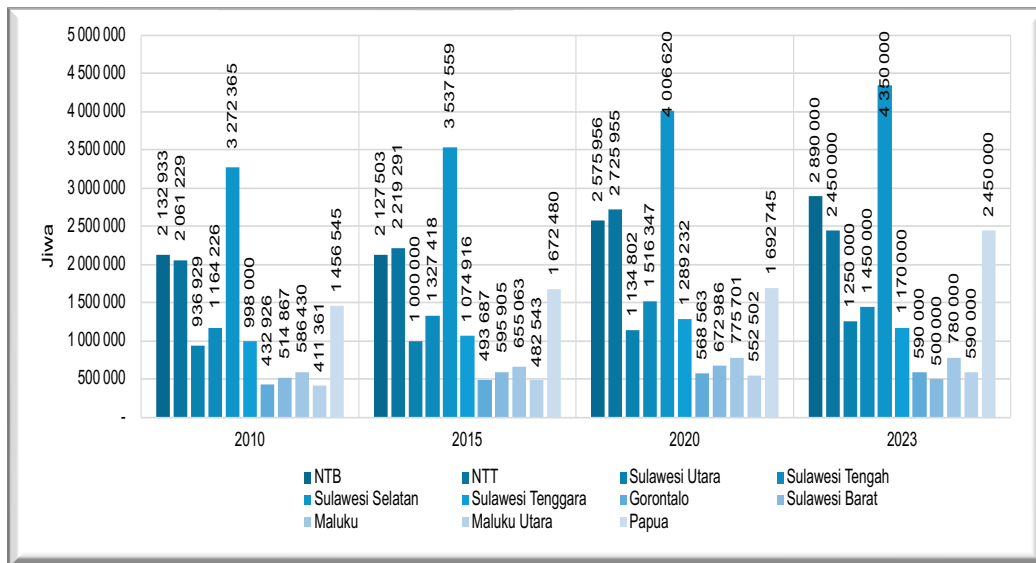


sebagai contoh, meskipun memiliki potensi besar dan beberapa proyek infrastruktur besar yang dibiayai swasta, tetap menunjukkan IPM terendah nasional, menunjukkan bahwa investasi belum berhasil mendorong kualitas SDM secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa investasi tanpa perencanaan inklusif dan kolaboratif cenderung hanya memperlebar ketimpangan antar wilayah.

Pengelolaan investasi yang baik tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dari sisi penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak peluang investasi swasta yang dihadirkan akan semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi tentu saja diperlukan peningkatan infrastruktur akses pelatihan bagi tenaga kerja lokal, dan kebijakan pemerintah yang mendukung keterlibatan masyarakat setempat dalam investasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat investasi dirasakan secara langsung oleh penduduk KTI dan berkontribusi pada pembangunan yang inklusif.

Penyerapan tenaga kerja di KTI menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, lihat Gambar 1.5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sedang terjadi pertumbuhan dari sisi industri dan teknologi, peningkatan transformasi digital di berbagai sektor, daya saing ekonomi serta tinggi permintaan tenaga kerja di kawasan ini. Tetapi harus diperhatikan juga bahwa meskipun penyerapan tenaga kerja meningkat setiap tahunnya penting untuk tetap mempertimbangkan kualitas tenaga kerja. Jika kualitas SDM masih rendah meskipun penyerapan tinggi, itu bisa berarti ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan.





Sumber: Provinsi Dalam Angka (2025), Data Diolah

Gambar 1. 5 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Provinsi di KTI Tahun 2010-2023

Gambar 1.5 di atas menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada 11 provinsi di KTI selama 2010-2023, mencatat Sulsel dengan jumlah tertinggi (4,35 juta jiwa) dan Sulbar terendah (500 ribu jiwa) pada tahun 2023. Perbedaan ini menandakan ketimpangan kapasitas ketenagakerjaan antar provinsi. Namun, tingginya penyerapan tenaga kerja tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas SDM, karena sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan produktivitas sektor.

Menurut teori *Human Capital* (Becker, 1993), pekerjaan yang bersifat produktif dan berorientasi pada pengembangan keterampilan akan meningkatkan modal manusia. Namun di KTI, mayoritas tenaga kerja terserap di sektor informal dan pertanian tradisional yang minim pelatihan. Hal ini sejalan dengan temuan UNDP Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi kerja di wilayah tertinggal sering tidak diikuti peningkatan produktivitas atau pendidikan.

Dari sudut pandang *New Keynesian*, pasar tenaga kerja KTI mengalami sehingga pertambahan tenaga kerja tidak otomatis meningkatkan pendapatan, (Mankiw, 2001). Sementara yang menentukan pembangunan



manusia bukan hanya kuantitas tenaga kerja, tetapi kualitas pekerjaan yang layak. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Papua, Maluku, dan Sulbar mencerminkan keterbatasan pembangunan seperti infrastruktur dan akses pendidikan yang terbatas. Sebaliknya, daerah dengan penyerapan tinggi seperti Sulsel dan NTB memiliki peluang memperkuat SDM jika diiringi dengan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas kerja. Tanpa hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga kerja hanya akan memperbesar sektor informal dan memperlambat transformasi ekonomi. Hal tersebut menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di KTI belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas SDM, karena masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah.

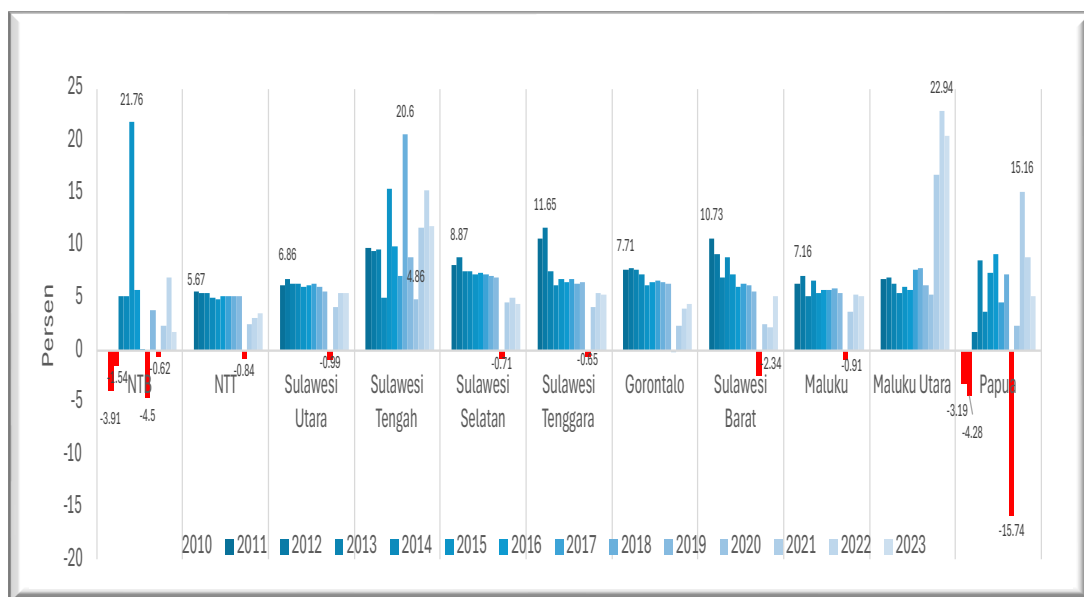
Dalam kerangka hubungan tidak langsung antara kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), desentralisasi memainkan peran penting sebagai pembangunan kebijakan daerah. Desentralisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui jalur tidak langsung. Otonomi dan kewenangan daerah mendorong penyerapan tenaga kerja, sementara efisiensi memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kombinasi ketiganya berdampak pada peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan layanan yang pada akhirnya memperkuat kualitas SDM. Dengan demikian, kebijakan yang adaptif memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan manusia, (Paddu, 2017)

Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan menjadi esensial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi di KTI memainkan peran kunci dalam menciptakan peluang baru dalam bisnis,

dan inovasi teknologi. Pertumbuhan ekonomi di sektor KTI juga dipacu stasi yang besar dalam riset dan pengembangan. Pertumbuhan ekonomi



di Kawasan Timur Indonesia (KTI) selama periode 2010–2023 memperlihatkan dinamika yang fluktuatif dan menunjukkan tingkat kerentanan struktural yang tinggi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi memang mencatat angka positif, tetapi tidak jarang terjadi kontraksi tajam pada tahun-tahun tertentu, bahkan hingga mencapai pertumbuhan negatif. Pola ini mencerminkan ketergantungan yang besar pada sektor ekstraktif dan jasa tertentu yang rentan terhadap guncangan eksternal maupun internal.



Sumber: BPS (2024), Data Diolah

Gambar 1. 6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di KTI Tahun 2010-2023

Pada Gambar 1.6 di atas terlihat meskipun sebagian besar provinsi mencatat pertumbuhan positif, kontraksi tajam sering terjadi akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif, pariwisata, dan jasa tertentu. NTB misalnya berkontraksi pada 2017 karena penurunan produksi tambang batu hijau dan pada 2020 akibat pandemi yang melumpuhkan pariwisata. NTT mengalami kontraksi negatif 2018 karena kekeringan, sedangkan Sulawesi Tengah terkena dampak tsunami Palu 2018 sebelum melonjak kembali pada 2019 berkat nikel. Maluku Utara berbalik dari kontraksi 2015 menjadi lonjakan 2022



karena smelter. Papua mengalami fluktuasi ekstrem, -15,7% pada 2020 akibat transisi Freeport dan pandemi, lalu bangkit kembali 15,6% pada 2023.

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik, memicu kontraksi di hampir semua provinsi KTI pada 2020. Pola ini menegaskan rapuhnya struktur ekonomi yang bergantung pada komoditas, pariwisata, dan jasa yang rentan terhadap *shock* eksternal. Lonjakan pertumbuhan tinggi lebih mencerminkan lonjakan komoditas sesaat, bukan transformasi struktural yang berkelanjutan.

Menurut teori *Human Capital* (Becker, 1964), pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan seharusnya menciptakan ruang untuk peningkatan kualitas SDM melalui ekspansi kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, jika pertumbuhan bersifat sektoral (misalnya hanya dari pertambangan atau industri ekstraktif), maka dampaknya terhadap SDM akan terbatas. Di banyak wilayah KTI, pertumbuhan tinggi sering kali tidak diikuti oleh peningkatan IPM secara signifikan, menandakan adanya pertumbuhan tanpa diikuti dengan pengembangan.

Dari perspektif teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990), kualitas SDM merupakan motor utama bagi pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, dalam konteks KTI, rendahnya kontribusi sektor berbasis pengetahuan dan keterampilan menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum menghasilkan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang menjadi faktor utama penghambat peningkatan kualitas SDM.

Studi UNDP (2020) dan World Bank (2021) menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur cenderung bersifat non-inklusif, karena terkonsentrasi pada sektor tertentu dan minim efek berantai (*multiplier effect*) pembangunan sosial. Misalnya, di Papua, meskipun PDRB tumbuh



karena tambang dan energi, angka partisipasi sekolah dan akses kesehatan masih rendah, menyebabkan IPM bergerak lambat.

Di tingkat internasional, OECD (2022) menekankan pentingnya *quality of growth*, yakni pertumbuhan yang menyertakan perluasan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan reformasi pasar tenaga kerja. Tanpa pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi hanya akan menciptakan disparitas antar wilayah dan memperdalam ketimpangan kualitas SDM fenomena yang nyata terlihat di KTI.

Variabel - variabel ekonomi makro di KTI masih menghadapi tantangan besar dalam terhadap menciptakan kualitas SDM. Ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam, rendahnya diversifikasi ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang memperlambat pengembangan SDM. Untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan investasi yang lebih besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, KTI dapat memanfaatkan potensi ekonominya untuk menciptakan SDM yang lebih berkualitas dan kompetitif. Dalam kurun waktu dua dekade sejak reformasi bergulir, di mana era demokrasi mulai diusung bahkan dalam hal demokrasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusianya secara keseluruhan, serta saat itu juga pola sentralisasi diubah menjadi desentralisasi dari berbagai sektor, tetapi upaya tersebut masih belum mampu menjawab persoalan yang ada.

Berbagai kajian empiris telah banyak membahas hubungan antara kebijakan-kebijakan fiskal dan pembangunan manusia, namun masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi makro bekerja melalui mekanisme perantara. Peran investasi swasta, penyerapan kerja, dan pertumbuhan ekonomi sebagai mediator dalam meningkatkan SDM belum diidentifikasi secara menyeluruh. Penelitian Amna Khalid dan



Bushra Yasmin, misalnya, mengenai *Fiscal Decentralization Development in Selected Developing Countries in Asia: Role of Institutionalization*, menekankan pentingnya institusi, tetapi belum memasukkan jalur transmisi ekonomi makro yang lebih kompleks.

Namun, terdapat celah yang belum terjawab. Pertama, konteks KTI jarang dikaji, padahal PAD sangat rendah, dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Kedua, indikator fiskal stres yang lazim adalah belanja per PAD kurang representatif untuk daerah dengan PAD kecil, sehingga penelitian ini menawarkan indikator alternatif PAD per Belanja. Ketiga, sebagian besar studi hanya menguji hubungan langsung, belum menelaah jalur mediasi melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Kebaruan pendekatan ini terletak pada upaya menjelaskan pengaruh tidak langsung yang selama ini belum menjadi perhatian dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu Realisasi fiskal dan faktor makroekonomi menjadi fokus penting untuk dinilai kontribusinya terhadap peningkatan kualitas SDM di KTI, karena terdapat indikasi bahwa meskipun alokasi fiskal relatif besar, hasil pembangunan manusia masih terjebak dalam keterbatasan struktural.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah fiskal stres berpengaruh terhadap kualitas SDM baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI ?
2. Apakah ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap kualitas SDM baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI ?



3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap kualitas SDM baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI ?
4. Apakah Upah Riil berpengaruh terhadap kualitas SDM baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh langsung maupun tidak langsung dari fiskal stres terhadap kualitas SDM melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI.
2. Pengaruh langsung maupun tidak langsung dari ketergantungan fiskal terhadap kualitas SDM melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI.
3. Pengaruh langsung maupun tidak langsung dari inflasi terhadap kualitas SDM melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI.
4. Pengaruh langsung maupun tidak langsung dari upah riil terhadap kualitas SDM melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di KTI.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini didedikasikan bagi semua pihak-pihak yang terkait langsung

penelitian ini, baik secara teoritis, praktis.



1.4.1. Kegunaan Teoritis

Menambah karya empiris yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangsa secara umum dan daerah secara khusus dengan variabel – variabel yang terkait yaitu fiskal stres, ketergantungan fiskal, inflasi, upah riil, investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi rencana penggunaan anggaran sehingga dapat disesuaikan dengan skala prioritas dalam menetapkan program-program pembangunan bagi peningkatan kualitas SDM pada 11 provinsi di KTI.

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di dalam membuat pola kebijakan yang bersifat strategis dari sektor fiskal, sektor riil dan juga finansial dalam upaya peningkatan kualitas SDM pada 11 provinsi di KTI.

Sebagai bahan evaluasi pembangunan bagi pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan fiskal untuk mendukung dan mengoptimalkan pembangunan manusia pada 11 provinsi di KTI.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi sebelas belas provinsi yang ada di KTI kecuali provinsi - provinsi di Timur Indonesia yang baru dimekarkan pada tahun-tahun awal analisis.

Variabel dalam penelitian ini dibatasi pada fiskal stres, ketergantungan fiskal, inflasi, upah riil, investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan inti dari transformasi ekonomi jangka panjang. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi global dan meningkatnya ketergantungan pada pengetahuan serta keterampilan, konsep tentang SDM dan teorinya terus mengalami perkembangan. Sejak awal abad ke-20, perdebatan tentang bagaimana SDM dipandang dalam teori ekonomi telah bergeser dari konsep tenaga kerja sebagai faktor produksi pasif menuju pemahaman bahwa manusia adalah aset produktif yang dapat ditingkatkan melalui investasi. Dua pendekatan dominan dalam diskursus ini adalah teori modal manusia dan pendekatan berbasis kapabilitas.

Teori modal manusia berakar pada ekonomi neoklasik dan dikembangkan secara formal oleh Theodore Schultz (1961) dan Gary Becker (1964). Mereka memandang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebagai bentuk investasi dalam diri individu yang meningkatkan produktivitas kerja dan potensi penghasilan. Dalam perspektif ini, SDM dipandang serupa dengan modal fisik di mana semakin tinggi investasinya, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, (Becker, 1993).

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa individu bersikap rasional dalam memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan atau pelatihan, sejauh manfaat ekonomi jangka panjangnya melebihi biaya. Model ini juga mendukung intervensi dalam pendidikan dasar dan kesehatan sebagai instrumen untuk meningkatkan akumulasi modal manusia nasional. Perspektif ini menjadi dasar



bagi mayoritas kebijakan pembangunan termasuk *mandatory spending* untuk sektor pendidikan dan kesehatan karena diyakini akan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi, (Barro, 1990).

Namun, teori ini mendapat kritik karena terlalu menekankan aspek ekonomi dan mengabaikan dimensi sosial serta struktural dari pembangunan manusia. Bagi kalangan ekonomi politik dan sosiologi pendidikan teori tersebut dianggap gagal menjelaskan ketimpangan hasil pendidikan. Dalam karya "*Schooling in Capitalist America*," (Bowles & Gintis, 1976) berargumen bahwa sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial daripada mengurangnya. Mereka menyatakan bahwa modal manusia tidak hanya bergantung pada akumulasi keterampilan, tetapi juga pada struktur kekuasaan dan hubungan sosial yang tidak setara. Selain itu, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan faktor eksternal seperti kualitas institusi, konteks budaya, dan akses yang tidak merata terhadap layanan pendidikan. Dalam praktiknya, individu dari kelompok miskin cenderung memiliki peluang investasi SDM yang terbatas, sehingga hasil yang dicapai tidak murni akibat pilihan rasional individu, tetapi juga ditentukan oleh kondisi struktural.

Dari sudut pandang strukturalis yang lahir sebagai kritik terhadap asumsi neoklasik yang lebih berpijak pada peran mekanisme pasar dalam mendorong pembangunan. Menurut aliran ini, negara berkembang tidak sama kondisinya dengan negara maju. Dalam argumentasi aliran ini menilai pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan terbatas hasilnya jika struktur ekonomi tetap timpang dan tidak menghasilkan transformasi yang produktif seperti harapan *human capital*. Dengan kata lain pandangan struktural ingin mengatakan bahwa pembentukan kualitas SDM merupakan hasil konfigurasi struktural ekonomi dan

jaan.



Di sisi lain, sebagai tanggapan terhadap keterbatasan teori modal manusia, Amartya Sen (1999) memperkenalkan pendekatan kapabilitas yang menekankan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam pendekatan ini, pembangunan manusia tidak diukur semata-mata dari tingkat pendidikan atau pendapatan, melainkan dari sejauh mana individu memiliki kapabilitas untuk memilih kehidupan yang mereka nilai bermakna. Sen berargumen bahwa investasi dalam SDM harus dilihat tidak hanya sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Hal ini kemudian diadopsi oleh UNDP dalam pengembangan *Human Development Index (HDI)* yang mengukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup sebagai indikator utama pembangunan (UNDP, 1990). Pendekatan kapabilitas menjadi dasar normatif dalam kebijakan pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial, (Sen, 1999).

Dalam praktik kebijakan, perdebatan antara teori modal manusia dan pendekatan kapabilitas tidak bersifat dikotomi. Banyak negara mengintegrasikan keduanya dalam strategi pembangunan SDM. Misalnya, kebijakan *conditional cash transfer* seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia menggabungkan prinsip ekonomi insentif dari modal manusia dengan pendekatan sosial yang mendorong kapabilitas masyarakat miskin (Bappenas, 2019). Selain itu, pendekatan multidimensi juga diadopsi oleh teori modal sosial yang menekankan pentingnya jaringan, kepercayaan, dan norma sosial dalam memperkuat kualitas SDM. Modal sosial dapat memengaruhi efektivitas investasi pendidikan, terutama di masyarakat dengan kohesi sosial tinggi, (Putnam, 2001).

Perdebatan teori sumber daya manusia menunjukkan bahwa pembangunan manusia bukan sekadar soal peningkatan *input* pendidikan, tetapi yangkut struktur peluang, konteks sosial, dan kemampuan mewujudkan n yang bermartabat. Teori modal manusia memberikan fondasi penting



bagi justifikasi ekonomi terhadap investasi pendidikan dan kesehatan. Namun, pendekatan strukturalis menekankan pentingnya unsur kelembagaan dan faktor kapabilitas memperluas pemahaman bahwa pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan dan kebebasan manusia.

Dalam beberapa konteks, kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dipandang sebagai hasil kumulatif dari interaksi antara kebijakan ekonomi makro, dinamika pasar tenaga kerja, dan tata kelola institusi. Kebijakan fiskal yang diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja berpotensi memperkuat kapasitas produktif masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi (Keynes, 1936; Becker, 1964). Dalam perspektif pertumbuhan endogen, investasi pada modal manusia mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan jangka panjang melalui akumulasi pengetahuan dan penyebaran teknologi (Romer, 1986; Lucas, 1988).

Namun, efek kebijakan makro terhadap SDM tidak berlangsung dalam ruang hampa. Stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan efektivitas kelembagaan menjadi penentu penting keberhasilan transmisi kebijakan. Rigiditas harga dan upah, segmentasi pasar tenaga kerja, dan hambatan pembiayaan dapat mengurangi kecepatan serta besarnya dampak kebijakan pada kesejahteraan masyarakat (Doeringer & Piore, 2020; Stiglitz, 1975). Perspektif Moneteris menyoroti bahwa tekanan inflasi yang berkepanjangan berpotensi mengikis daya beli rumah tangga, mengurangi kapasitas mereka untuk membiayai pendidikan dan kesehatan, sehingga melemahkan pembentukan modal manusia, (Friedman, 1995).

Selain itu, pendekatan ekonomi kelembagaan baru menekankan bahwa alokasi anggaran publik tidak otomatis sejalan dengan perbaikan karena kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas memengaruhi



sejauh mana sumber daya dapat diubah menjadi peningkatan kualitas SDM,(North, 1990). Dalam konteks inilah, efektivitas kebijakan ekonomi makro untuk mendorong pengembangan SDM bergantung pada sinergi antara desain kebijakan, struktur ekonomi, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, terutama wilayah-wilayah seperti KTI, pendekatan multidimensi sangat relevan. Ketimpangan akses, kualitas layanan dasar, dan keterbatasan institusi memerlukan strategi SDM yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga berbasis hak dan partisipasi. Oleh karena itu, sintesis antara modal manusia, kapabilitas, dan modal sosial menjadi kunci untuk mendorong pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perdebatan mengenai teori pertumbuhan ekonomi telah berlangsung sejak abad ke-18 dan terus berkembang seiring perubahan konteks sosial, teknologi, dan globalisasi. Tiap pendekatan teori memiliki asumsi dasar yang berbeda mengenai faktor-faktor utama penggerak pertumbuhan serta bagaimana peran pemerintah, pasar, dan institusi dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Dari pendekatan klasik yang berfokus pada akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk, hingga pendekatan modern yang mempertimbangkan inovasi, ekspektasi, dan peran institusi, perkembangan teori pertumbuhan mencerminkan dinamika kompleks pembangunan ekonomi global. Pandangan *New Keynesian* hadir sebagai integrasi antara pemikiran Keynesian dan perkembangan teori mikroekonomi modern, menawarkan penjelasan baru

stagnasi pertumbuhan, rigiditas harga dan upah, serta peran ekspektasi aksempurnaan pasar, (Mankiw, 1985; Woodford, 2003).



Dalam ulasannya mengenai teori pertumbuhan, Daron Acemoglu menjelaskan bahwa pemikiran klasik dari Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan keunggulan komparatif sebagai faktor penentu utama pembangunan ekonomi; Ricardo (1817) secara khusus menunjukkan keterbatasan pertumbuhan jangka panjang melalui konsep *diminishing returns*. Acemoglu kemudian mengembangkan pemikiran neoklasik melalui model Solow Swan (1956) yang menggunakan fungsi produksi agregat dan teknologi sebagai faktor eksogen, serta menyoroti konsep *steady-state* dan fenomena *convergence* di mana negara-negara miskin diasumsikan berkembang lebih cepat dibanding negara maju. Namun, Acemoglu juga menyoroti kritik mendasar terhadap model neoklasik ini, yaitu bahwa pengeluaran teknologi sebagai faktor eksternal tidak menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi dihasilkan secara endogen, sehingga model ini kurang mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan antar-negara dan proses inovasi yang sesungguhnya, (Acemoglu, 2008).

Munculnya teori pertumbuhan endogen pada akhir 1980-an, seperti yang dikembangkan oleh (Lucas, 1988; Romer, 1986), merupakan respons langsung terhadap keterbatasan model neoklasik. Teori ini menjadikan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), pendidikan, dan akumulasi pengetahuan sebagai bagian integral dari proses pertumbuhan. Teknologi dan inovasi tidak lagi dianggap eksternal, melainkan sebagai hasil dari keputusan ekonomi (Romer, 1990). Teori ini membuka ruang bagi kebijakan publik dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama melalui investasi di bidang pendidikan dan infrastruktur pengetahuan (Lucas, 1988). Namun, kritik terhadap model ini muncul



sumsinya yang idealistis terkait efisiensi riset dan pengembalian investasi
gi secara terus-menerus, (Jones & Manuelli, 1990).

New Keynesian muncul sebagai respons terhadap model makroekonomi klasik dan neoklasik yang gagal menjelaskan pengangguran yang bertahan lama dan krisis ekonomi. Berbeda dari model Keynesian awal yang bersifat deskriptif, *New Keynesian* menggunakan dasar mikroekonomi dan teori kontrak untuk menjelaskan fenomena rigiditas harga dan upah (O. Blanchard & Galí, 2007). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, *New Keynesian* menyoroti bahwa ketidaksempurnaan pasar seperti *menu cost*, *sticky wages*, dan *monopolistic competition* dapat mempengaruhi akumulasi modal dan insentif investasi (Mankiw, 1985). Ketika perusahaan menghadapi biaya penyesuaian harga atau ketidakpastian permintaan, mereka mungkin menunda investasi produktif. Akibatnya, pertumbuhan bisa stagnan meskipun terdapat potensi sumber daya. *New Keynesian* juga mengadopsi elemen dari teori pertumbuhan endogen dengan menekankan pentingnya ekspektasi dan kebijakan yang kredibel. Intervensi pemerintah, seperti stimulus fiskal atau kebijakan suku bunga jangka panjang, dipandang perlu untuk mengatasi "*under investment traps*" yang sering kali dialami negara berkembang, (Benigno & Woodford, 2003).

Dalam konteks global saat ini, perdebatan berkembang pada tiga poros utama peran negara, peran inovasi, dan ketimpangan. *New Keynesian* memperluas wacana dengan mendukung intervensi negara yang strategis dalam mendorong investasi swasta melalui stabilisasi makroekonomi, (Aghion & Howitt, 2006). Hal ini sejalan dengan argumen (Cattaneo, 2014) mengenai "*the entrepreneurial state*" yang berperan aktif dalam menciptakan pasar dan mendorong inovasi.

Namun, para kritikus dari mazhab libertarian atau neoklasik tetap kan bahwa terlalu banyak intervensi dapat menciptakan distorsi pasar ighambat efisiensi (Friedman, 1962). Di sisi lain, pendekatan *New*



Keynesian juga mulai mengakomodasi isu ketimpangan, di mana stagnasi pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi kekayaan dan lemahnya permintaan agregat, (Stiglitz, 2012).

Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi mencerminkan kompleksitas dinamika pembangunan yang tidak bisa dijelaskan oleh satu pendekatan tunggal. New Keynesian berhasil menjembatani elemen-elemen mikro dan makroekonomi, serta mengakomodasi peran institusi, rigiditas pasar, dan ekspektasi dalam kerangka pertumbuhan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya merevisi kerangka lama, tetapi juga membuka ruang bagi kebijakan yang lebih realistis dan adaptif terhadap konteks negara berkembang (O. Blanchard, 2000).

Dalam menghadapi tantangan masa depan seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan disrupsi pasar tenaga kerja teori pertumbuhan modern perlu bersifat multidimensi dan kontekstual. New Keynesian menawarkan fondasi kuat untuk dialog antara teori dan kebijakan dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan komponen vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam perspektif makroekonomi, peran tenaga kerja tidak hanya sebagai *input* dalam proses produksi, tetapi juga sebagai penerima pendapatan dan konsumen akhir yang membentuk permintaan agregat. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada sejauh mana pasar tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hubungan antara dinamika tenaga kerja dan kualitas SDM menjadi

enting dalam teori ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan permintaan (*aggregate demand*). Perdebatan antara teori klasik, Keynesian, hingga



pendekatan New Keynesian mencerminkan perbedaan mendasar dalam memahami bagaimana permintaan tenaga kerja terbentuk, dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas SDM.

Pandangan klasik dan neoklasik menyatakan bahwa pasar tenaga kerja akan selalu menuju keseimbangan jika dibiarkan bekerja secara bebas. Upah diasumsikan fleksibel, dan setiap kelebihan penawaran atau permintaan tenaga kerja akan dikoreksi melalui penyesuaian upah. Dalam kerangka ini, pengangguran bersifat sukarela, dan tidak ada peran aktif pemerintah yang dibutuhkan, (Mankiw, 2009). Namun, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan realitas rigiditas pasar tenaga kerja dan ketimpangan struktural. Dalam konteks permintaan agregat, penurunan upah untuk mengatasi pengangguran justru dapat memperburuk kualitas SDM. Hal ini karena penurunan pendapatan rumah tangga akan menurunkan pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang semuanya merupakan faktor penting dalam pembentukan modal manusia, (Blinder, 2008). (Varian, 2015) juga menunjukkan bahwa fleksibilitas sempurna sangat jarang terjadi di pasar tenaga kerja modern, terutama di negara berkembang.

John Maynard Keynes mengubah cara pandang terhadap pasar tenaga kerja dengan menyatakan bahwa pengangguran tidak hanya disebabkan oleh ketidaksesuaian upah, tetapi juga oleh kurangnya permintaan efektif dalam perekonomian. Dalam *The General Theory* (1936), Keynes berpendapat bahwa menurunkan upah nominal tidak serta-merta meningkatkan kesempatan kerja karena menurunkan permintaan agregat melalui penurunan pendapatan rumah tangga. Keynes mengusulkan agar pemerintah memainkan peran aktif dalam

ang permintaan melalui belanja publik, (Tcherneva, 2008). Dalam konteks berarti bahwa penciptaan lapangan kerja melalui proyek publik tidak



hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, yang pada akhirnya memperkuat investasi dalam pendidikan dan kesehatan, (Albertini dkk., 2021; Jahan dkk., 2014). Dengan demikian, pasar tenaga kerja menjadi instrumen kebijakan untuk memperbaiki kualitas SDM.

Pendekatan *New Keynesian* memperkuat gagasan Keynes dengan menambahkan fondasi mikroekonomi. Salah satu elemen penting adalah pengakuan terhadap rigiditas harga dan upah. Dalam teori upah efisiensi menjelaskan bahwa perusahaan sering kali menetapkan upah di atas tingkat pasar untuk mendorong produktivitas dan mengurangi *moral hazard*. Akibatnya, ketika terjadi kontraksi permintaan, penyesuaian tidak terjadi melalui pemotongan upah, tetapi melalui pengurangan tenaga kerja, (Shapiro & Stiglitz, 1984).

Dalam konteks ini, kualitas SDM terpengaruh karena rigiditas upah memperbesar risiko pengangguran involunter, terutama di kalangan tenaga kerja berpendidikan rendah. (Mankiw & Romer, 1991) juga menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini, intervensi kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga permintaan agregat dan stabilitas ketenagakerjaan. Penurunan ketenagakerjaan berdampak pada turunnya akses pendapatan keluarga untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.

Dalam pendekatan teori *search and matching* menunjukkan bahwa meskipun lowongan kerja tersedia, friksi dalam pencocokan antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan menciptakan pengangguran struktural. Hal ini sangat relevan dalam konteks pembangunan SDM, karena *mismatch skill* akan menghambat produktivitas dan menurunkan efisiensi investasi pendidikan, (Pissarides, 2000).



teori segmentasi pasar tenaga kerja oleh (Doeringer & Piore, 2020b) menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak homogen. Di negara berkembang,

mayoritas pekerja berada di sektor informal yang cenderung memiliki upah rendah, tanpa perlindungan sosial, dan akses terbatas terhadap pelatihan. (Ablaza dkk., 2021) menunjukkan bahwa pekerja sektor informal memiliki peluang lebih kecil untuk mengakses pendidikan lanjutan atau pelatihan keterampilan.

Dalam konteks permintaan agregat, sektor informal cenderung memiliki konsumsi tambahan yang tinggi, sehingga peningkatan permintaan agregat dapat meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Namun, tanpa dukungan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, peningkatan pendapatan tersebut tidak selalu terkonversi menjadi peningkatan kualitas SDM. Di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur, pasar tenaga kerja ditandai oleh dominasi sektor informal, pengangguran terbuka, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja. Oleh karena itu, pendekatan *New Keynesian* dan segmentasi pasar lebih mampu menjelaskan realitas tersebut. Dalam kebijakan fiskal, (Wardhono dkk., 2021) mencatat bahwa yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya dan pemberdayaan pelatihan vokasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas SDM.

Sementara itu, belanja publik harus difokuskan pada infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan agar efek terhadap SDM menjadi lebih signifikan. Ini sejalan dengan gagasan Keynesian bahwa permintaan agregat tidak hanya penting untuk pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk pembangunan sosial jangka panjang, (Prasetyo & Cahyani, 2022).

Perdebatan teori tenaga kerja dari sisi permintaan agregat menunjukkan bahwa pendekatan klasik yang menekankan fleksibilitas pasar memiliki keterbatasan dalam menjelaskan pengaruh terhadap kualitas SDM. Pendekatan

n dan *New Keynesian* memberikan kerangka yang lebih realistis dalam kan bagaimana ketenagakerjaan, upah, dan permintaan agregat



memengaruhi kemampuan rumah tangga untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan kualitas SDM melalui pasar tenaga kerja memerlukan intervensi yang menyasar rigiditas, ketidaksesuaian keterampilan, serta sektor informal. Intervensi fiskal, pelatihan vokasional, dan kebijakan upah minimum yang efektif dapat berfungsi sebagai katalisator untuk memperkuat koneksi antara ketenagakerjaan dan pembangunan manusia.

2.1.4 Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen kunci dalam permintaan agregat dan sering dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam konteks pembangunan SDM, efektivitas investasi khususnya investasi swasta masih menjadi bahan perdebatan di antara para ekonom. Tidak semua bentuk investasi secara otomatis berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM. Beberapa pendekatan teoritis memandang investasi sebagai instrumen netral atau bahkan kontraproduktif jika tidak diarahkan secara tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji spektrum teori investasi dari perspektif negatif hingga positif terhadap kualitas SDM.

Dalam praktiknya, banyak investasi yang bersifat kapital intensif atau berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, terutama di negara berkembang. Investasi jenis ini sering kali tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM. Di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur, sejumlah studi menunjukkan bahwa investasi besar di sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan,

tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal dan memiliki dampak terbatas terhadap peningkatan atau keterampilan masyarakat (UNDP & Bappenas, 2020).



Dalam perspektif strukturalis, investasi berpotensi memperdalam ketimpangan bila diarahkan ke sektor yang tidak inklusif; model dualisme klasik Lewis menegaskan bahwa akumulasi modal di sektor modern tidak otomatis menyerap surplus tenaga kerja dari sektor tradisional, sementara alokasi yang mengabaikan dimensi sektoral dan spasial memicu marginalisasi dan ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (Fields, 2011).

Tradisi strukturalis dan gagasan *dual economy* menunjukkan bahwa perekonomian yang bertumpu pada komoditas dan padat modal memiliki elastisitas penyerapan kerja rendah serta keterkaitan antar sektor terbatas, sehingga pertumbuhan yang tercipta cenderung tidak inklusif dan sulit terkonversi menjadi perbaikan indikator pendidikan dan kesehatan. Dalam konfigurasi seperti itu, ekspansi investasi dan *output* dapat menaikkan PDRB tanpa mendorong akumulasi modal manusia. Temuan kutukan sumber daya semakin menguatkan argumen ini dengan menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya alam kerap berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih lambat dan transformasi struktural yang lemah ketika institusi dan kebijakan tidak memadai, (Sachs & Warner, 2001).

Selain itu, pendekatan institusional yang dikemukakan oleh (Acemoglu & Robinson, 2013) menekankan bahwa investasi tidak akan optimal jika tidak ditopang oleh institusi yang menjamin hak milik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa negara-negara dengan kelembagaan lemah sering kali mengalami kegagalan dalam mengonversi investasi menjadi pembangunan SDM yang berkelanjutan.

Investasi juga sebenarnya dapat bergantung pada konteks dan intervensi kebijakan. Pandangan Keynesian menyatakan bahwa investasi adalah komponen m permintaan agregat. Namun, Keynes (1936) mengkritik pandangan rwa investasi semata-mata ditentukan oleh tingkat bunga dan tabungan.



la memperkenalkan konsep "*animal spirits*" atau dengan kata lain sentimen ekonomi untuk menjelaskan bahwa ekspektasi pelaku usaha terhadap masa depan mempengaruhi keputusan investasi. Dalam kondisi krisis atau ketidakpastian tinggi, bahkan suku bunga rendah tidak menjamin meningkatnya investasi.

Pandangan ini diperluas oleh pendekatan *New Keynesian* yang menambahkan dimensi rigiditas harga dan upah, serta ekspektasi rasional. Investasi swasta sangat bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan stabilitas makroekonomi. Dalam lingkungan yang tidak stabil atau ketika institusi tidak dipercaya, investasi cenderung stagnan meskipun insentif diberikan, (Clarida dkk., 1999a).

Dengan kata lain, pendekatan ini melihat investasi sebagai instrumen yang efektif jika didukung oleh ekosistem kebijakan dan institusi yang kondusif. Dalam konteks pembangunan SDM, ini berarti bahwa investasi baru akan memberikan dampak signifikan jika diarahkan melalui regulasi dan insentif ke sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja.

Secara normatif dalam teori pertumbuhan endogen, investasi memainkan peran sentral dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) serta pendidikan menghasilkan efek spillover yang mendorong pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, (Romer, 1990) Sementara itu, (Lucas Jr, 1988) menekankan pentingnya akumulasi modal manusia yang dipicu oleh keputusan investasi rasional pada sektor pendidikan dan pelatihan.

Teori ini menolak asumsi model Solow yang memandang teknologi sebagai exogen. Sebaliknya, mereka menganggap bahwa pertumbuhan teknologi SDM bisa direayasa melalui investasi publik maupun swasta yang



tepat sasaran. Dengan demikian, investasi bukan hanya menghasilkan modal fisik, tetapi juga memperkuat kemampuan individu dan institusi.

Teori *human capital* yang dikembangkan oleh (Becker, 1975) juga mendukung pandangan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi produktif. Menurut Becker, rumah tangga dan pemerintah yang mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan dan kesehatan individu akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan yang lebih baru juga menekankan pentingnya keterkaitan antara investasi dan kualitas kelembagaan. Keberhasilan investasi dalam meningkatkan SDM sangat tergantung pada pemerintahan yang baik, keterbukaan ekonomi, dan transparansi anggaran publik, (Rodrik, 2007).

Perdebatan teoritis tentang investasi menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kualitas SDM tidak bersifat otomatis. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, investasi harus dirancang secara strategis agar memberikan efek berganda terhadap pembangunan manusia. Teori struktural dan institusional memberikan peringatan bahwa investasi dapat gagal tanpa dukungan kelembagaan. Pendekatan Keynesian dan *New Keynesian* menekankan pentingnya stabilitas dan kepercayaan pasar, sedangkan teori pertumbuhan endogen dan *human capital* memberikan dasar normatif bahwa investasi yang tepat dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas SDM.

Dengan demikian, dalam membangun kerangka konseptual penelitian atau kebijakan, penting untuk tidak hanya mengukur volume investasi, tetapi juga memperhatikan sektor tujuan, struktur kelembagaan, dan kualitas belanja.

yang diarahkan ke sektor sosial dan pendidikan dengan tata kelola yang



baik berpotensi menjadi jalur utama dalam meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan.

2.1.5 Teori Upah

Upah merupakan salah satu variabel utama dalam analisis ekonomi makro yang tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi tenaga kerja, tetapi juga sebagai indikator kesejahteraan, daya beli, dan insentif dalam sistem produksi. Dalam konteks pembangunan SDM, tingkat dan struktur upah memiliki implikasi penting terhadap kualitas hidup, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta akumulasi modal manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, teori-teori upah tidak hanya membahas mekanisme pasar tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi pada perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pendekatan *New Keynesian* menekankan bahwa pasar tenaga kerja tidak sepenuhnya fleksibel. Dalam model ini, kekakuan nominal dan riil (*sticky wages*) menyebabkan upah tidak serta merta menyesuaikan terhadap guncangan ekonomi, (Mankiw, 1985). Ketika terjadi resesi, upah tetap tinggi akibat kontrak dan norma kelembagaan, sehingga penyesuaian terjadi melalui kuantitas tenaga kerja, bukan harga, yaitu peningkatan pengangguran, (O. Blanchard & Galí, 2007).

Dalam konteks ini, upah riil berfungsi sebagai sinyal biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Jika upah riil naik tanpa disertai peningkatan produktivitas, maka nilai marginal produk tenaga kerja akan lebih kecil dari biaya riilnya, mendorong pengurangan tenaga kerja, (Woodford, 2003). Model rigiditas ini juga dijelaskan dalam *Phillips Curve* versi *New Keynesian*, yang menekankan keterlambatan penyesuaian pasar terhadap inflasi dan kebijakan moneter, (Galí, 2013).



~ dalam teori permintaan tenaga kerja dan *crowding out* Upah riil yang tinggi biaya nyata bagi perusahaan. Jika tidak disertai dengan peningkatan

produktivitas, hal ini menyebabkan pengurangan tenaga kerja, (Ehrenberg dkk., 2021). Dalam situasi ini, rumah tangga kehilangan pendapatan stabil dan akses pelatihan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas SDM. Konsep *crowding out* menunjukkan bahwa biaya *input* yang tinggi, termasuk upah, dapat mendorong perusahaan menunda ekspansi atau mengurangi penggunaan tenaga kerja.

Kemudian dari sisi perilaku konsumsi rumah tangga, secara empiris peningkatan upah riil tidak selalu digunakan untuk investasi modal manusia. (Banerjee & Duflo, 2007). menemukan bahwa rumah tangga miskin lebih cenderung menggunakan tambahan pendapatan untuk konsumsi jangka pendek daripada pendidikan atau kesehatan, karena keterbatasan literasi ekonomi dan tekanan kebutuhan dasar.

Dari sudut pandangan model dualisme Lewis (1954) menjelaskan bahwa kenaikan upah di sektor formal sering kali tidak menyentuh sektor informal, yang menyerap mayoritas tenaga kerja di daerah berkembang seperti KTI. Ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar, memperdalam kesenjangan sosial, dan menghambat pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, (Fields, 2004; Todaro & Smith, 2020a).

Dalam struktur ekonomi yang dominan sektor informal seperti di KTI, kenaikan upah riil tidak selalu menghasilkan perbaikan SDM. Penelitian menunjukkan bahwa upah riil yang tinggi tanpa dukungan produktivitas dan kapasitas fiskal akan menekan profitabilitas sektor swasta, menghambat ekspansi, dan mengurangi penciptaan lapangan kerja produktif, (Okudaira dkk., 2019).

Terdapat beberapa pandangan yang tidak sejalan dengan pemikiran di atas. Teori neoklasik menekankan bahwa upah ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja. Perusahaan membayar upah sesuai kontribusi tenaga kerja *output*. Pasar diasumsikan bersifat kompetitif dan upah akan



menyesuaikan secara otomatis untuk mencapai keseimbangan, (Pigou, 2017). Meskipun pendekatan ini cenderung normatif dan ideal, ia memberikan dasar bahwa dalam pasar tenaga kerja efisien, peningkatan produktivitas akan mendorong peningkatan upah dan kualitas hidup pekerja.

Teori ini menyatakan bahwa membayar upah di atas tingkat pasar akan meningkatkan produktivitas, mengurangi *turn over*, dan menarik tenaga kerja berkualitas. Dikenalkan oleh (Akerlof & Yellen, 1986; Shapiro & Stiglitz, 1984). Teori ini menunjukkan bahwa upah lebih tinggi dapat menjadi insentif positif bagi peningkatan kinerja. Dengan demikian, upah yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan produktivitas kerja dan kepuasan kerja.

Dalam kerangka Keynesian, upah tidak hanya dilihat sebagai biaya produksi, tetapi juga sebagai komponen penting dari permintaan agregat. Keynes berargumen bahwa kenaikan upah dapat merangsang konsumsi rumah tangga, sehingga mendorong permintaan agregat dan pemulihan ekonomi dalam masa resesi, (Blinder, 2008). Pandangan ini mendasari kebijakan upah minimum, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan investasi rumah tangga dalam pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, teori upah dalam konteks permintaan agregat mencakup spektrum luas dari pendekatan normatif hingga kritik struktural. Teori neoklasik, efisiensi upah, dan Keynesian menyoroti potensi positif upah terhadap permintaan dan pembangunan SDM. Namun pendekatan New Keynesian dan kritik struktural memperingatkan bahwa tanpa peningkatan produktivitas dan respons kebijakan yang tepat, kenaikan upah riil dapat menimbulkan tekanan

terhadap ketenagakerjaan dan pembangunan SDM. Oleh karena itu, penelitian terhadap dampak upah riil terhadap kualitas SDM harus



mempertimbangkan struktur pasar tenaga kerja, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta efektivitas kebijakan makro dalam mengelola rigiditas dan ketimpangan.

2.1.6 Teori Inflasi

Teori Inflasi merupakan gejala makroekonomi yang sering dijadikan indikator kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam kerangka permintaan agregat (*aggregate demand*), inflasi umumnya dipicu oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi, yang menimbulkan tekanan terhadap harga barang dan jasa. Meskipun dalam jangka pendek inflasi dari sisi permintaan mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan kualitas SDM, terutama di wilayah dengan struktur sosial ekonomi yang rentan, (Becker, 1975; Mankiw, 2001). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji teori-teori yang relevan guna memahami bagaimana inflasi dari sisi permintaan dapat berdampak negatif terhadap kualitas SDM baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari sisi perspektif teoretis yang mendukung inflasi dari sisi permintaan agregat ada pendekatan *New Keynesian* dalam ekonomi makro modern, di mana pendekatan *New Keynesian* telah menjadi salah satu kerangka teoretis paling berpengaruh dalam menjelaskan dinamika inflasi. Aliran ini berangkat dari semangat Keynesian klasik yang menekankan peran penting permintaan agregat, tetapi dikembangkan lebih lanjut dengan menyisipkan fondasi mikroekonomi yang kuat, seperti kekakuan harga (*sticky prices*), kekakuan upah (*sticky wages*), serta ekspektasi rasional para pelaku ekonomi (Mankiw & Romer, 1991). Dengan

ini, aliran *New Keynesian* tidak hanya menjelaskan bagaimana inflasi



terbentuk, tetapi juga bagaimana mekanisme transmisi kebijakan makro bekerja dalam perekonomian dengan pasar yang tidak fleksibel.

Salah satu kontribusi utama pendekatan *New Keynesian* adalah menjelaskan mengapa harga dan upah tidak langsung menyesuaikan diri terhadap guncangan ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Dalam argumentasinya, Mankiw menjelaskan bahwa perusahaan sering kali menghadapi *menu costs* yang membuat mereka enggan menyesuaikan harga secara berkala, bahkan saat kondisi ekonomi berubah. Kekakuan ini menciptakan situasi di mana tingkat harga menjadi kaku, dan kejutan terhadap permintaan atau penawaran tidak segera diimbangi oleh penyesuaian harga, sehingga menyebabkan fluktuasi *output* dan pengangguran. Dalam konteks inflasi, rigiditas ini dapat memperburuk erosi daya beli rumah tangga dan mengurangi kemampuan mereka berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan, sehingga pada akhirnya menurunkan kualitas SDM.

Model *Phillips Curve* (Phillips, 1958) menunjukkan adanya *trade off* jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, di mana sedikit kenaikan inflasi dapat diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Dalam kerangka ini, inflasi moderat dapat diterima apabila mendorong peningkatan kesempatan kerja. Namun, ketika inflasi berada pada tingkat tinggi tanpa diiringi kenaikan pendapatan riil, daya beli menurun, kualitas pekerjaan memburuk, dan investasi pada pendidikan serta kesehatan terhambat, sehingga kualitas sumber daya manusia turut terpengaruh secara negatif.

Pendekatan New Keynesian berargumen bahwa rigiditas harga dan upah menyebabkan penyesuaian terhadap inflasi menjadi lambat. Ini memperburuk dampak negatif inflasi terhadap konsumsi dan investasi rumah tangga (Blanchard

2007). Inflasi yang dihasilkan dari sisi permintaan tidak lantas menstimulasi pertumbuhan berkualitas, apalagi jika struktur ekonomi cenderung timpang.



Pendekatan struktural memandang bahwa inflasi juga dipengaruhi oleh kegagalan institusional, distribusi logistik, dan ketergantungan impor. Artinya, inflasi tidak hanya hasil dari permintaan yang meningkat, tetapi dari kegagalan struktur ekonomi. Dalam konteks ini, efek inflasi terhadap SDM terjadi melalui distorsi harga dan alokasi sumber daya yang tidak efisien, (Todaro & Smith, 2020a).

Model *Calvo Pricing* yang diperkenalkan oleh (Calvo, 1983) juga memperkuat pemahaman tentang kekakuan harga dalam ekonomi. Dalam model ini, hanya sebagian perusahaan yang dapat menyesuaikan harga pada waktu tertentu, sementara sisanya tetap mempertahankan harga lama. Akibatnya, kebijakan moneter dapat memengaruhi *output* dan inflasi, tergantung pada seberapa besar fraksi perusahaan yang menyesuaikan harga di tiap periode.

Dalam praktik kebijakan, teori *New Keynesian* memberikan justifikasi kuat bagi kebijakan suku bunga berbasis aturan, seperti *Taylor Rule*, dan pendekatan target inflasi yang banyak diadopsi oleh bank sentral, termasuk Bank Indonesia. (Woodford, 2003) melalui karyanya *Interest and Prices*, menyusun teori kebijakan moneter optimal dalam kerangka *New Keynesian* dan menegaskan bahwa transparansi serta ekspektasi masyarakat merupakan kunci efektivitas kebijakan. Selanjutnya dalam pandangan ini menjelaskan bahwa pasar tidak bekerja secara efisien dalam jangka pendek karena rigiditas harga dan upah. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi seperti pengaturan suku bunga acuan (*Taylor Rule*) atau intervensi fiskal dianggap esensial dalam menjaga kestabilan inflasi dan *output*, (Taylor, 1993).

Namun, pendekatan di atas ini tidak sepenuhnya bebas kritik, (Mankiw &

- 2) memperkenalkan *sticky information model* sebagai alternatif dari *sticky* dalam model ini, yang kaku bukan harga itu sendiri, tetapi informasi yang



digunakan oleh pelaku ekonomi untuk membuat keputusan. Mereka menyarankan bahwa keterlambatan dalam pembaruan informasi oleh perusahaan dan rumah tangga menyebabkan kebijakan moneter memiliki efek tertunda, bahkan ketika pelaku pasar bersikap rasional. Model ini menawarkan penjelasan yang lebih halus atas *lag* kebijakan dan rigiditas dalam perekonomian riil.

Perdebatan lainnya muncul dari konsep “*divine coincidence*”, yaitu gagasan bahwa menstabilkan inflasi akan secara otomatis menstabilkan output. Blanchard & Galí (2007) menantang asumsi ini dengan menunjukkan bahwa ketika terdapat rigiditas upah nominal atau gangguan struktural lain, maka stabilisasi inflasi tidak selalu berarti stabilisasi output. Ini menunjukkan bahwa bank sentral sering kali menghadapi *trade off* dalam kebijakan makro, dan tidak cukup hanya fokus pada inflasi saja.

Kemudian terdapat kritik dari pendekatan teoretis kontra terhadap inflasi dari sisi permintaan agregat salah satu tantangan besar datang dari Monetarist, yang dipelopori oleh Milton Friedman (1968). Ia berpendapat bahwa inflasi adalah selalu dan di mana pun fenomena moneter, dan mengklaim bahwa kendali atas jumlah uang beredar sudah cukup untuk mengelola inflasi. Dalam pandangan ini, intervensi fiskal atau penekanan pada kekakuan harga dianggap tidak terlalu penting, selama bank sentral menjaga pertumbuhan moneter yang stabil, (Černohorský, 2021).

Pandangan kontra lainnya datang dari aliran *Real Business Cycle* (RBC) yang dipelopori oleh (Kydland & Prescott, 1982). Pendekatan RBC menolak peran signifikan kebijakan moneter atau fiskal dalam menjelaskan fluktuasi ekonomi.

Dalam kerangka mereka, fluktuasi *output* dan inflasi lebih disebabkan oleh an teknologi atau perubahan preferensi konsumsi. Pasar dianggap



sempurnanya fleksibel, dan intervensi pemerintah dianggap berisiko menciptakan distorsi tambahan.

Sebagai tanggapan terhadap kritik tersebut, beberapa ekonom New Keynesian mengembangkan model yang memasukkan ketidaksempurnaan pasar keuangan, ketidakpastian eksogen, dan perilaku adaptif sebagai respons terhadap informasi yang tidak sempurna, (O. Blanchard & Galí, 2007b). Model-model ini menjadi lebih relevan untuk menjelaskan fluktuasi harga dan output di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang struktur pasarnya masih rentan terhadap rigiditas struktural dan tekanan fiskal.

Perdebatan seputar teori inflasi dalam pendekatan New Keynesian mencerminkan dinamika pemikiran ekonomi modern yang terus berkembang. Meskipun pendekatan ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi kebijakan moneter di banyak negara, ia tetap menghadapi kritik baik dari dalam maupun luar mazhabnya sendiri. Namun, dengan kemampuannya menjelaskan peran rigiditas harga, ekspektasi, dan kebijakan makro dalam pembentukan inflasi, pendekatan New Keynesian tetap menjadi kerangka teoritis yang relevan terutama dalam menganalisis inflasi dan dinamika makroekonomi di wilayah seperti KTI, yang mengalami tekanan struktural dan fiskal yang kompleks.

2.1.7 Teori Desentralisasi Fiskal

Perdebatan tentang efektivitas desentralisasi fiskal telah menjadi pembahasan sentral dalam ekonomi publik, terutama terkait bagaimana kewenangan fiskal yang dialihkan ke daerah mampu menghasilkan efisiensi, akuntabilitas, dan pemerataan pembangunan. Pandangan yang mendukung

desentralisasi fiskal secara normatif banyak dipengaruhi oleh teori generasi yang diperkenalkan oleh Tiebout (1956). Melalui model “*voting with your*



feet,” Tiebout berargumen bahwa dalam kondisi persaingan antar daerah, masyarakat akan memilih untuk tinggal di wilayah yang mampu menyediakan kombinasi layanan publik dan pajak yang sesuai preferensi mereka. Persaingan ini, dalam jangka panjang, diyakini akan mendorong efisiensi dan mendorong pemerintah daerah memperbaiki kinerja layanan publik.

Namun, pendekatan Tiebout dinilai terlalu idealis. Kritik utama diarahkan pada asumsi mobilitas penduduk yang sempurna, padahal dalam praktiknya, faktor sosial, ekonomi, dan geografis membatasi mobilitas tersebut. Selain itu, model ini mengabaikan ketimpangan fiskal antar wilayah dan eksternalitas pada lintas daerah, yang justru menjadi realitas struktural di negara berkembang seperti Indonesia. Akibatnya, pendekatan ini sulit diterapkan secara utuh tanpa koreksi institusional yang memadai.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, Musgrave (1959) dan Oates (1972) memperluas kerangka analisis desentralisasi fiskal dengan memperkenalkan tiga fungsi utama pemerintah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oates secara khusus mengembangkan *Decentralization Theorem* yang menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih efisien dalam menyediakan barang publik lokal karena lebih dekat dengan preferensi masyarakat. Akan tetapi, Oates juga mengakui bahwa tanpa koordinasi fiskal nasional, desentralisasi bisa memunculkan ketimpangan pelayanan dan tidak efisiennya alokasi, terutama ketika kapasitas fiskal daerah sangat bervariasi. Lebih lanjut dalam kerangka *Second Generation Fiscal Federalism*, Oates menjelaskan bahwa capaian pembangunan manusia ditentukan bukan semata oleh besar kecilnya ruang fiskal, melainkan oleh tata aturan dan institusi yang mengarahkan dana publik ke layanan



melalui transfer antarpemerintah, penganggaran berbasis fungsi, serta pelayanan minimum. Dalam lingkungan seperti itu, dana transfer

cenderung menempel pada belanja daerah sehingga dampak fiskal muncul langsung pada mutu layanan pendidikan dan kesehatan tanpa harus melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, atau pertumbuhan ekonomi sebagai perantara. Fenomena ini dikenal sebagai *flypaper effect* dan telah didokumentasikan luas dalam literatur federalisme fiskal, (Hines Jr & Thaler, 1995; Oates, 1993).

Pendekatan normatif Oates kemudian mendapat tantangan dari (Brennan & Buchanan, 1980) melalui *Leviathan Hypothesis*. Mereka berargumen bahwa pemerintah, terutama pusat, cenderung bertindak sebagai entitas “rakus” yang ingin memperbesar otoritas dan penerimaan pajaknya. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal dianggap sebagai mekanisme pembatas kekuasaan Leviathan, sekaligus alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi fiskal. Akan tetapi, pandangan ini menuai perdebatan.

Namun, anggapan bahwa semua pemerintah berperilaku sebagai Leviathan dianggap menyederhanakan kompleksitas institusi politik dan ekonomi, karena dalam praktiknya, banyak sistem demokrasi telah mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang membatasi ruang fiskal pemerintah (Besley & Case, 1995). Lebih jauh lagi, Oates (1999) mengkritik *Leviathan Hypothesis* karena mengabaikan pentingnya mekanisme transfer fiskal dalam mengoreksi ketimpangan antar daerah. Tanpa adanya redistribusi dari pusat, desentralisasi justru memperbesar ketimpangan fiskal dan sosial.

Ketegangan antara efisiensi dan pemerataan ini juga tampak dalam pandangan (Lockwood, 2005) yang mengusulkan adanya tingkat optimal desentralisasi fiskal. Terlalu sedikit desentralisasi dianggap mengabaikan

di lokal, sedangkan desentralisasi yang berlebihan berisiko menciptakan asasi kebijakan dan koordinasi yang lemah. Fenomena ini semakin



kompleks ketika persaingan fiskal antar daerah memicu praktik *race to the bottom* sebagaimana dikritik oleh (Janeba & Wilson, 2011) di mana daerah menurunkan pajak secara berlebihan demi menarik investasi, namun mengorbankan kualitas layanan publik. Di sisi lain, dari pendekatan fiskal makro, teori Debt Overhang (Krugman, 1988a) memperingatkan bahwa desentralisasi fiskal yang tidak disertai disiplin anggaran dapat mendorong daerah mengalami beban utang tinggi. Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk pembayaran kewajiban fiskal, belanja produktif seperti pendidikan dan kesehatan terpinggirkan. Risiko *moral hazard* juga muncul ketika daerah mengandalkan bantuan dana pusat daripada membangun kemandirian fiskal.

Dengan demikian, *race to the bottom* dan *debt overhang* bersama dengan PAD yang rendah, belanja rutin tinggi, serta ketergantungan pada transfer pusat menciptakan fiskal stres di daerah. Fiskal stres membatasi ruang belanja produktif dan menyebabkan sebagian besar anggaran terserap pada pengeluaran rutin. Akibatnya, kemampuan fiskal untuk mendukung peningkatan layanan publik menjadi terbatas meskipun belanja publik secara agregat terus meningkat.

Beberapa literatur, tidak terdapat rumus baku yang secara universal disepakati untuk mengukur fiskal stres karena perbedaan konteks keuangan publik di tiap negara. Secara umum, fiskal stres didefinisikan sebagai keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah dalam memenuhi belanja operasional dan pelayanan publik, yang dapat tercermin dari defisit anggaran, *debt service ratio*, maupun lemahnya pendapatan relatif terhadap kebutuhan belanja, (Maher & Deller, 2011; Rubin & Willoughby, 2009).

Dalam konteks Indonesia yang menerapkan desentralisasi fiskal dengan i PAD relatif kecil, fiskal stres lazim diproksikan dengan rasio PAD belanja daerah, di mana rasio yang rendah menunjukkan lemahnya



kapasitas fiskal dan tingginya tekanan fiskal, (Junita & Abdullah, 2016; Muryawan & Sukarsa, 2016). Menurut Peacock dan Wiseman, kapasitas fiskal juga dipengaruhi oleh toleransi masyarakat terhadap pajak; bila beban pajak melebihi batas toleransi, fiskal stres akan muncul, (Arnett, 2011). (Chapman, 2003) menambahkan bahwa tekanan fiskal dapat timbul ketika pendapatan menurun sementara permintaan layanan meningkat, atau ketika ada kewajiban tambahan tanpa dukungan dana. Dengan demikian, semakin kecil kontribusi PAD terhadap belanja, semakin besar fiskal stres yang dialami pemerintah daerah, sekaligus menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer pusat.

Beralih pada perspektif yang berbeda, pandangan *New Institutional Economics* oleh North Douglas menekankan bahwa efektivitas kebijakan fiskal terhadap kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas institusi yang mengelolanya. Artinya meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran besar, hasilnya terhadap peningkatan kualitas SDM tidak otomatis tercapai jika institusi atau lembaga pemerintah yang mengelolanya tidak memiliki kapasitas, integritas dan tata kelola yang baik, (North, 1990). Kelembagaan yang lemah meningkatkan risiko korupsi, *rent seeking*, dan salah sasaran anggaran. Biaya transaksi yang tinggi akibat birokrasi berbelit dan koordinasi yang buruk dapat menghambat implementasi kebijakan, (Bazie dkk., 2024; Mbaku, 1998; Narh, 2025). Kepercayaan publik yang rendah terhadap institusi menurunkan pemanfaatan fasilitas publik, sementara kebijakan yang tidak sesuai dengan konteks lokal berpotensi gagal mencapai sasaran. Dengan kata lain bahwa institusi dalam hal ini pemerintah adalah jembatan yang menyalurkan kebijakan fiskal dalam bentuk pelayanan kepada publik dan pembangunan manusia. Sebab jika tidak, maka

sebagus apa pun tidak akan sampai kepada tujuan. Sementara teori *policy uncertainty* menegaskan bahwa kebijakan fiskal dapat menimbulkan



ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, terutama di negara dengan keuangan publik tidak berkelanjutan atau proses politik terpolarisasi, (Bhatia dkk., 2024; Clemens & Soretz, 2004; Hong dkk., 2025).

Dari perdebatan tentang desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diyakini mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pemerataan layanan publik, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi nyata di lapangan. Asumsi ideal model Tiebout dan Oates sering tidak terpenuhi karena adanya ketimpangan fiskal, risiko fragmentasi kebijakan, serta potensi *race to the bottom* dan *debt overhang*. Perspektif *New Institutional Economics* menegaskan bahwa kualitas kelembagaan menjadi faktor kunci, karena institusi yang lemah memicu korupsi, salah sasaran anggaran, dan biaya transaksi tinggi, sementara teori *fiscal policy uncertainty* menunjukkan bahwa instabilitas fiskal dan politik yang terpolarisasi dapat memperburuk ketidakpastian kebijakan. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendorong pembangunan manusia dan peningkatan kualitas SDM tidak dapat dinilai secara tunggal, melainkan harus diuji secara empiris sesuai dengan konteks kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah.

2.1.8 Pandangan New Keynesian

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan *New Keynesian Economics*, yang berkembang sejak akhir 1970-an sebagai respons terhadap keterbatasan teori Keynesian klasik dalam menjelaskan dinamika ekonomi modern. Teori ini mempertahankan semangat Keynesian dalam hal pentingnya intervensi kebijakan makro, namun mengintegrasikannya dengan pendekatan mikroekonomi dan ekspektasi rasional agar lebih konsisten secara teoretis (Mankiw & Romer, 1991; dkk., 2003). Dengan demikian, New Keynesian menjembatani antara



keyakinan bahwa pasar tidak selalu efisien dan asumsi bahwa agen ekonomi tetap bertindak rasional.

Salah satu asumsi utama dalam pendekatan New Keynesian adalah adanya kekakuan harga (*sticky prices*) dan kekakuan upah (*sticky wages*) yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar berlangsung dalam jangka waktu yang tidak singkat (Mankiw, 1985). Dalam kondisi seperti ini, perekonomian tidak serta-merta kembali pada tingkat *output* potensial secara otomatis seperti yang diyakini dalam pendekatan neoklasik. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter dianggap masih sangat diperlukan untuk menstabilkan output dan menurunkan pengangguran, terutama saat terjadi guncangan eksternal atau krisis, (Clarida dkk., 1999a).

Konsep ini juga memperhatikan adanya biaya penyesuaian harga (*menu costs*), kompetisi monopolistik, serta friksi pasar tenaga kerja, yang menyebabkan dunia usaha dan rumah tangga tidak segera merespons perubahan ekonomi secara sempurna, (O. J. Blanchard & Kiyotaki, 1987; Rotemberg, 1982). Dalam pasar yang tidak fleksibel, kebijakan fiskal dapat berperan sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan, termasuk dalam penyediaan layanan dasar yang menunjang kualitas SDM. Dalam konteks ini, fiskal stres dan ketergantungan fiskal yang tinggi dipandang dapat mengurangi efektivitas intervensi pemerintah terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja.

Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan teori ini menyusun model-model yang menjelaskan bagaimana rigiditas nominal dan friksi struktural dapat menyebabkan kegagalan pasar berlangsung lama, serta menegaskan pentingnya

kebijakan yang tepat waktu dan terarah. Misalnya, melalui *Taylor Rule*, Taylor menunjukkan bagaimana kebijakan moneter yang responsif



terhadap inflasi dan *output gap* dapat menstabilkan perekonomian secara lebih efektif, (Taylor, 1993).

Sementara itu, *Rational Expectations Hypothesis* (Muth, 1961; Lucas, 1972) dari aliran *New Klasik* memberikan pandangan berbeda. Teori ini berasumsi bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi berdasarkan informasi yang tersedia secara rasional dan memahami struktur perekonomian. Dengan demikian, kebijakan yang dapat diprediksi, seperti stimulus fiskal atau penyesuaian suku bunga, akan segera diantisipasi oleh pelaku pasar. Akibatnya, respons yang ditimbulkan baik melalui penyesuaian harga, upah, maupun alokasi sumber daya dapat mengimbangi efek kebijakan tersebut sebelum memberikan dampak riil yang sesungguhnya, (Snowdon & Vane, 2005).

Kerangka penelitian ini menempatkan teori New Keynesian sebagai landasan utama. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri dengan cepat, sehingga intervensi fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan. Dalam kerangka tersebut, teori *human capital* menjelaskan *outcome* akhir dari intervensi fiskal, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan produktivitas. Teori pertumbuhan endogen berperan melengkapi dengan menegaskan mekanisme jalur pertumbuhan, di mana kebijakan fiskal dapat mendorong investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya memperkuat kualitas SDM. Sementara itu, teori desentralisasi fiskal menghadirkan dimensi kelembagaan, menekankan bagaimana transfer pusat menjadi instrumen penting untuk menutup keterbatasan PAD di daerah, khususnya di KTI. Dalam konteks KTI, di mana tantangan fiskal

struktural dan pasar tenaga kerja didominasi sektor informal, pendekatan Keynesian dianggap menjadi sangat relevan. Kenaikan upah riil tanpa



peningkatan produktivitas, serta tekanan fiskal yang membatasi kapasitas belanja sosial, mencerminkan kondisi yang sangat cocok dianalisis menggunakan kerangka New Keynesian. Dalam pendekatan ini, hubungan antara variabel makroekonomi dan kualitas SDM tidak bersifat otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh efektivitas saluran transmisi kebijakan fiskal melalui investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan SDM tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga bagian integral dari strategi stabilisasi ekonomi dan peningkatan produktivitas jangka panjang.

2.2. Hubungan Teoritis Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Fiskal Stres Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selama empat dekade terakhir, kualitas sumber daya manusia (SDM) telah menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Di KTI, pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan kapasitas fiskal daerah. Fiskal stress, yang mencerminkan tekanan anggaran akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas intervensi pemerintah. Dalam kerangka pemikiran New Keynesian, ketidakseimbangan fiskal tidak hanya berpengaruh pada belanja publik, tetapi juga pada stabilitas makroekonomi dan iklim investasi, (Mankiw & Romer, 1991; Woodford, 2003). Kekakuan harga dan upah (*sticky prices and wages*) membuat intervensi fiskal diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi (Mankiw, 1985).

Secara langsung, fiskal stres berdampak pada penurunan kualitas SDM dengan memangkas belanja strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam situasi tekanan fiskal, pemerintah cenderung memprioritaskan belanja rutin dan



mengurangi alokasi Pembangunan, (Clarida dkk., 1999a). Hal ini mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar yang esensial bagi pengembangan SDM, apalagi ketika kelembagaan publik masih sarat dengan inefisiensi dan korupsi. Dengan demikian, fiskal stres secara langsung memberi pengaruh negatif terhadap kualitas SDM karena menghambat layanan publik dasar yang seharusnya ditingkatkan, (O. J. Blanchard & Kiyotaki, 1987; Rotemberg, 1982).

Selain itu, fiskal stres juga bekerja melalui jalur tidak langsung. Ketidakpastian fiskal menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif sehingga melemahkan ekspektasi dunia usaha (Taylor, 1993). Rendahnya kapasitas fiskal mengurangi kemampuan pemerintah memberikan insentif pada proyek strategis, termasuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang menjadi penopang kualitas SDM. Ketika sinyal dukungan fiskal melemah, aliran modal berkurang, lapangan kerja terbatas, dan pada akhirnya mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan serta layanan yang lebih baik. Dampak berikutnya terlihat pada penyerapan tenaga kerja. Belanja pemerintah yang berkontraksi membatasi rekrutmen di sektor publik, khususnya guru, tenaga kesehatan, dan pelatih vokasional, sehingga ketersediaan tenaga profesional di daerah terpencil menurun. Di sektor swasta, melemahnya investasi membuat penciptaan lapangan kerja stagnan, padahal dalam kerangka New Keynesian rigiditas pasar tenaga kerja membuat pemulihan tanpa intervensi fiskal berjalan sangat lambat, (Clarida dkk., 1999b). Dengan demikian, jalur tenaga kerja menunjukkan bahwa fiskal stres memperlemah kapasitas produktif jangka panjang yang berdampak pada kualitas SDM.

Lebih jauh, fiskal stres memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di wilayah yang bergantung pada belanja pemerintah, tekanan fiskal memperlambat pemulihan, membatasi pembiayaan pembangunan produktif, dan mengurangi



sumber daya untuk sektor pendidikan dan Kesehatan, (Oates, 1999). Kondisi ini melahirkan lingkaran setan fiskal-pembangunan, di mana tekanan fiskal memperlemah pertumbuhan, yang pada gilirannya menghambat perbaikan kualitas SDM. Fakta empiris dari KTI pada periode 2010–2023 memperlihatkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat membuat daerah rentan terhadap fluktuasi fiskal. Hal ini konsisten dengan teori *Debt Overhang* (Krugman, 1988), bahwa ketika anggaran daerah terserap oleh kewajiban fiskal, belanja produktif cenderung terpinggirkan. Sementara itu, perspektif *Leviathan Hypothesis*, (Brennan & Buchanan, 1980) menunjukkan bahwa tanpa mekanisme *check and balance*, pemerintah berpotensi mengutamakan belanja yang tidak produktif. Karena itu, tata kelola fiskal menjadi faktor penentu: tanpa reformasi kelembagaan dan efisiensi fiskal, tekanan anggaran justru menghambat pembangunan kualitas manusia.

Keseluruhan bukti ini menegaskan bahwa fiskal stres memiliki pengaruh negatif yang nyata dan multidimensional terhadap kualitas SDM. Tidak hanya berdampak langsung melalui pemangkasan anggaran layanan dasar, tetapi juga tidak langsung melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Perspektif New Keynesian menegaskan bahwa pasar tidak dapat memulihkan diri secara otomatis, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus menjamin pembangunan SDM, antara lain melalui reformasi belanja publik, penguatan perencanaan fiskal, dan kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur sosial. Dengan menempatkan kualitas SDM sebagai tujuan sekaligus instrumen pembangunan, kebijakan fiskal perlu dirancang secara inklusif, produktif, dan adaptif terhadap

struktur di KTI.



2.2.2. Hubungan Ketergantungan Fiskal, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Ketergantungan fiskal merupakan kondisi ketika suatu daerah sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja publik, termasuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Fenomena ini menonjol di KTI karena lemahnya kapasitas fiskal lokal dan rendahnya Pendapatan di daerah. Dalam perspektif teoretis, hubungan ketergantungan fiskal dengan kualitas SDM dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal, (Oates, 1972), *Leviathan Hypothesis* (Brennan & Buchanan, 1980), serta pendekatan New Keynesian (Clarida dkk., 1999; Mankiw & Romer, 1991). Tingginya ketergantungan fiskal secara langsung membatasi ruang penganggaran daerah, sehingga fleksibilitas untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal menjadi rendah. Akibatnya, pelayanan dasar sering tidak optimal, memperlebar ketimpangan fiskal dan menekan kualitas SDM, (Paddu, 2017).

Dampak ketergantungan fiskal juga muncul melalui jalur tidak langsung. Pertama, rendahnya kapasitas fiskal melemahkan iklim investasi karena pemerintah sulit menyediakan infrastruktur maupun insentif yang mendorong sektor swasta. Kondisi ini menurunkan aliran modal dan mempersempit peluang pengembangan SDM, (Davoodi & Zou, 1998).

Kedua, keterbatasan fiskal membatasi penciptaan lapangan kerja baik di sektor publik maupun swasta. Dalam konteks pasar tenaga kerja yang rigid, kondisi ini meningkatkan pengangguran dan memperlambat pemulihan ekonomi, (Nwosa & Akinbobola, 2016a). Ketiga, ketergantungan fiskal menekan pertumbuhan ekonomi

panjang karena belanja publik cenderung terfokus pada pengeluaran rutin, mana dijelaskan oleh teori *Debt Overhang*, (Krugman, 1988).



Pertumbuhan ekonomi yang lambat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja, sehingga memperburuk kualitas SDM.

Ketiga jalur tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran ketergantungan fiskal. Lemahnya dukungan fiskal menurunkan investasi, mempersempit serapan tenaga kerja, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat siklus ketergantungan dan menahan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (Bappenas, 2022; Jin & Jakovljevic, 2023). Dalam kerangka New Keynesian, ketergantungan fiskal yang tinggi juga meningkatkan ketidakpastian fiskal, melemahkan ekspektasi investor, serta menimbulkan kontraksi ekonomi melalui efek pengganda negatif, (Clarida dkk., 1999; Corsetti dkk., 2012). Dengan demikian, hubungan antara ketergantungan fiskal dan kualitas SDM bersifat negatif dan kompleks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penguatan PAD, peningkatan efisiensi belanja daerah, serta reformasi tata kelola fiskal menjadi prasyarat mutlak bagi daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

2.2.3. Hubungan Inflasi, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Inflasi merupakan indikator makroekonomi penting dalam menilai stabilitas perekonomian. Inflasi yang moderat dapat mendukung pertumbuhan, tetapi inflasi yang tinggi menciptakan distorsi ekonomi, ketidakpastian, dan penurunan daya beli masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, inflasi tidak hanya memengaruhi harga barang dan jasa, tetapi juga memiliki dampak berantai

investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pada kualitas SDM. Bagi wilayah seperti Kawasan Timur Indonesia (KTI),



dengan struktur ekonomi yang rapuh dan ketergantungan fiskal tinggi, efek inflasi menjadi lebih signifikan.

Dari sisi mekanisme, inflasi menekan investasi swasta karena ketidakpastian biaya *input* dan *output* mengurangi insentif ekspansi usaha, (Dornbusch dkk., 1993). Kerangka *New Keynesian*, rigiditas harga dan upah serta *menu costs* menegaskan bahwa inflasi meningkatkan risiko makroekonomi (Mankiw & Romer, 1991; Blanchard & Galí, 2007). Penurunan investasi ini berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja. Dengan upah nominal yang tidak menyesuaikan cepat terhadap inflasi, daya beli pekerja turun, sektor informal melebar, dan pengangguran meningkat, (Friedman, 1995; Hussain & Haque, 2017; Phelps, 1970). Kondisi ini pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh (Khan & Ssnhadji, 2001) bahwa inflasi di atas ambang batas menurunkan pertumbuhan jangka Panjang.

Konsekuensi lebih jauh dari inflasi tercermin pada penurunan kualitas SDM. Kenaikan harga menggerus daya beli rumah tangga sehingga porsi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menurun, sementara kapasitas fiskal pemerintah dalam menyediakan layanan publik ikut tertekan akibat merosotnya nilai riil penerimaan. Kondisi ini sejalan dengan teori Human Capital (Becker, 1993) yang menekankan pentingnya investasi pendidikan dan kesehatan dalam membentuk tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Studi (Bhorat & Kanbur, 2006) membuktikan bahwa inflasi tinggi mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, sehingga memperburuk ketimpangan. Dengan demikian, inflasi tinggi berdampak negatif terhadap investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menekan kualitas SDM. Stabilitas harga

a merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan manusia yang utan.



Berdasarkan uraian di atas, inflasi memiliki hubungan negatif terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya kualitas SDM. Dalam konteks KTI, inflasi lebih banyak dipicu faktor biaya (*cost-push*). Keterbatasan infrastruktur dan distribusi di KTI menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi. Keterbatasan transportasi laut maupun udara, serta tingginya harga bahan bakar, sehingga mendorong kenaikan harga barang secara umum. Di sisi lain, ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah menjadikan KTI sangat rentan terhadap pelemahan kurs rupiah maupun kenaikan harga pangan dan energi global yang langsung tercermin dalam inflasi lokal. Selain itu, penerapan kebijakan upah minimum (UMP) pada struktur pasar kerja formal yang relatif kecil berimplikasi pada meningkatnya biaya tenaga kerja, yang pada gilirannya membatasi kapasitas operasional perusahaan lokal. Pendekatan New Keynesian dan teori *Human Capital* memberikan justifikasi teoretis yang kuat terhadap dampak struktural inflasi.

Secara empiris, berbagai studi mendukung kesimpulan bahwa inflasi merusak iklim investasi, menurunkan kesempatan kerja, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperlemah kapasitas rumah tangga serta negara untuk berinvestasi dalam SDM. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas dalam desain kebijakan makroekonomi.

2.2.4. Hubungan Upah Riil, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM

Upah riil merupakan komponen penting dalam kerangka permintaan agregat yang mencerminkan daya beli aktual dari pendapatan pekerja setelah dikurangi dengan tingkat inflasi. Dalam ekonomi makro, kenaikan upah riil teoretis dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperluas



permintaan agregat, dan memicu aktivitas ekonomi. Namun, dinamika upah riil tidak selalu berdampak positif dalam seluruh dimensi ekonomi, terutama ketika terjadi dalam kondisi rigiditas pasar tenaga kerja atau ketidakseimbangan struktural. Dalam kerangka ini, hubungan antara upah riil dengan investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Kenaikan upah riil dapat mendorong konsumsi rumah tangga karena meningkatkan daya beli. Namun, dari perspektif pelaku usaha, kenaikan upah tanpa disertai peningkatan produktivitas akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan keuntungan. Hal ini dapat menurunkan insentif untuk melakukan investasi baru atau ekspansi usaha. Dalam kerangka teori *New Keynesian*, rigiditas upah (*sticky wages*) menyebabkan ketidakseimbangan antara biaya tenaga kerja dan *output* dalam jangka pendek (Mankiw & Romer, 1991). Studi empiris oleh (Feldstein, 2008) menunjukkan bahwa kenaikan upah riil yang tidak seimbang dengan produktivitas dapat menurunkan *return on capital* dan memperlambat investasi swasta.

Selanjutnya, upah riil juga memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara teori, kenaikan upah riil dapat mendorong partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, bila terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, upah yang tinggi dapat menyebabkan pengusaha mengurangi permintaan tenaga kerja. Dalam konteks *Phillips Curve*, terdapat *trade off* jangka pendek antara tingkat upah dan pengangguran. Blanchard & Galí (2007) menjelaskan bahwa kenaikan upah riil dalam pasar yang tidak fleksibel menyebabkan pengusaha mengurangi tenaga kerja karena tidak

menyesuaikan *output* secara cepat.



Secara empiris penelitian oleh (Nickell, 1997) di Eropa menunjukkan bahwa rigiditas upah riil menyebabkan persistensi pengangguran dalam jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, sektor informal yang dominan membuat pasar tenaga kerja sangat sensitif terhadap perubahan upah. Ketika upah riil naik tanpa dukungan produktivitas, perusahaan informal cenderung merumahkan pekerja atau menahan rekrutmen baru.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, upah riil memainkan peran ganda. Di satu sisi, kenaikan upah mendorong konsumsi, yang menjadi komponen utama dari permintaan agregat. Di sisi lain, jika kenaikan upah tidak diiringi dengan kenaikan produktivitas dan efisiensi investasi, maka potensi pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Dalam kerangka model pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh akumulasi modal manusia dan produktivitas total faktor, (R. J. Barro, 1991).

Studi oleh (Aghion dkk., 1998) menunjukkan bahwa insentif untuk berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi sangat dipengaruhi oleh margin keuntungan, yang bisa tergerus oleh tekanan upah. Oleh karena itu, kebijakan upah harus seimbang antara tujuan kesejahteraan dan keberlanjutan produktivitas jangka panjang. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga kenaikan upah riil tetap selaras dengan produktivitas tenaga kerja.

Upah riil juga berkaitan dengan kualitas SDM. Dalam teori *Human Capital*, kesejahteraan ekonomi yang lebih baik memungkinkan rumah tangga untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak (Becker, 1993).

Kenaikan upah riil dapat meningkatkan konsumsi gizi, akses terhadap layanan kesehatan, dan partisipasi pendidikan. Namun, jika kenaikan upah hanya terjadi di



sektor informal atau bersifat semu akibat tekanan inflasi, maka dampak positifnya terhadap kualitas SDM bisa menjadi minimal.

Studi oleh (Deaton, 2003) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi akibat kenaikan upah riil hanya akan berdampak pada kualitas hidup jika disertai dengan akses terhadap layanan dasar yang memadai. Dalam konteks Indonesia, banyak wilayah tertinggal masih mengalami ketimpangan dalam distribusi layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kenaikan upah riil perlu dibarengi dengan penguatan infrastruktur sosial.

Secara keseluruhan, hubungan antara upah riil dan variabel-variabel ekonomi utama seperti investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM bersifat kompleks dan kontekstual. Dalam kerangka permintaan agregat, upah riil merupakan salah satu pendorong konsumsi dan *output*. Namun, tanpa didukung oleh reformasi struktural di pasar tenaga kerja, produktivitas, dan distribusi layanan publik, kenaikan upah riil justru dapat menciptakan tekanan terhadap dunia usaha dan memperburuk ketimpangan sosial.

2.2.5. Hubungan Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam kerangka permintaan agregat (*aggregate demand*), investasi swasta merupakan salah satu komponen kunci yang mendorong permintaan total dalam perekonomian, bersama konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Ketika investasi swasta meningkat, permintaan agregat akan naik, yang mendorong peningkatan produksi nasional, memperluas kapasitas industri, meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Dalam kerangka ini, investasi bukan hanya instrumen akumulasi modal, tetapi juga menjadi penggerak



dinamika makroekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi swasta mendorong penciptaan kapasitas produksi baru dan ekspansi usaha. Hal ini secara langsung menciptakan permintaan tambahan terhadap tenaga kerja, baik di sektor manufaktur, jasa, maupun industri berbasis teknologi. Dalam model AD-AS, peningkatan investasi mendorong pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan, menyebabkan kenaikan *output* riil dan penyerapan tenaga kerja jika perekonomian berada di bawah kapasitas penuh, (Mankiw, 2003). Studi empiris oleh (Feldstein & Horioka, 1980) menunjukkan bahwa peningkatan rasio investasi terhadap PDB berkorelasi positif dengan penurunan tingkat pengangguran.

Selanjutnya, dampak investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui efek permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, investasi meningkatkan belanja modal, yang menstimulasi *output* jangka pendek melalui efek *multiplier*. Dari sisi penawaran, investasi meningkatkan kapasitas produktif ekonomi melalui pembentukan modal baru, inovasi teknologi, dan efisiensi produksi. Romer (1990) dalam teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa akumulasi modal swasta, khususnya yang disertai inovasi, merupakan determinan utama pertumbuhan jangka panjang. Studi oleh (Barro, 1991b; De Mello Jr, 1997). memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan investasi swasta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB riil di negara berkembang.

Dalam konteks kualitas SDM, investasi swasta menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga. Kenaikan

ini berpotensi meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Dalam *Human Capital Theory*, Becker menyebutkan



bahwa peningkatan pendapatan mendorong rumah tangga untuk berinvestasi lebih besar pada pengembangan modal manusia. Selain itu, perusahaan swasta yang berorientasi pada produktivitas jangka panjang juga cenderung melakukan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyediaan fasilitas sosial bagi karyawan. Studi oleh (Noorbakhsh dkk., 2001) menunjukkan bahwa aliran investasi swasta ke negara berkembang sering kali disertai peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi dan praktik kerja modern.

Investasi swasta juga berdampak pada kualitas SDM secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan meningkat akibat investasi, penerimaan pemerintah dari pajak juga bertambah. Ini memungkinkan peningkatan belanja negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Studi empiris oleh (A. Suryahadi dkk., 2009) membuktikan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi sebagai hasil investasi yang intensif menunjukkan peningkatan IPM yang lebih baik. Dalam konteks permintaan agregat, ini mencerminkan peran investasi dalam menciptakan permintaan efektif terhadap layanan publik yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Namun, perlu dicatat bahwa dampak positif investasi dalam kerangka permintaan agregat hanya optimal dalam kondisi pasar tenaga kerja yang fleksibel, iklim usaha yang kondusif, dan kelembagaan yang mendukung. Jika ada hambatan struktural seperti rigiditas upah, korupsi, atau ketidakpastian regulasi, maka efek permintaan dari investasi swasta bisa menjadi lemah atau tertahan, (Campos & Nugent, 2003).

Secara keseluruhan, investasi swasta dalam kerangka permintaan agregat memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kualitas SDM.



2.2.6. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tiga pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Ketiganya saling terkait dalam suatu siklus yang saling memengaruhi: pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menciptakan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja yang produktif akan mendorong peningkatan pendapatan dan kualitas hidup, yang pada gilirannya memperkuat kualitas SDM dan berkontribusi kembali pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam narasi akademik ini, hubungan ketiga variabel tersebut dijelaskan berdasarkan kerangka teori ekonomi dan diperkuat dengan kajian empiris.

Pertama, penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori klasik, pertumbuhan *output* ekonomi memerlukan *input* tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Model pertumbuhan Solow (1956) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang bergantung pada pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, sektor-sektor produktif akan melakukan ekspansi dan menciptakan permintaan tambahan terhadap tenaga kerja. Dalam kerangka permintaan agregat, pertumbuhan permintaan *output* juga akan meningkatkan permintaan terhadap *input* tenaga kerja, (Mankiw, 2003).

Namun, penyerapan tenaga kerja yang tinggi belum tentu secara otomatis berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM, kecuali jika pekerjaan yang diciptakan bersifat produktif, formal, dan disertai dengan jaminan sosial serta pelatihan. Dalam teori *Human Capital*, peningkatan keterampilan dan pendidikan

kerja menjadi syarat utama untuk menjadikan angkatan kerja sebagai aset manusia (Becker, 1993). Oleh karena itu, kualitas pekerjaan menjadi hal



yang krusial dalam menjembatani hubungan antara penyerapan tenaga kerja dan kualitas SDM.

World Bank (2019) menyatakan bahwa negara-negara berkembang yang mengalami penurunan tingkat pengangguran belum tentu mengalami peningkatan kualitas SDM jika sebagian besar pekerjaan berada di sektor informal dan berproduktivitas rendah. Di Indonesia, BPS (2022) mencatat bahwa walaupun angka pengangguran menurun, mayoritas pekerja baru terserap di sektor informal, yang tidak banyak berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas SDM melalui peningkatan pendapatan nasional dan belanja sosial. Dalam model pertumbuhan endogen (Romer, 1990), pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh akumulasi pengetahuan dan inovasi akan meningkatkan kapasitas suatu negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Kualitas SDM yang tinggi merupakan hasil dari investasi jangka panjang pada modal manusia, yang secara empiris berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, (Barro & Lee, 2013).

Studi oleh (Hanushek & Woessmann, 2012) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan lebih penting daripada sekadar peningkatan rata-rata tahun sekolah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada SDM adalah pertumbuhan yang disertai dengan peningkatan efisiensi alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Penyerapan tenaga kerja juga dapat memperkuat kualitas SDM secara langsung. Pekerja yang masuk ke sektor formal memiliki akses terhadap kerja, pengembangan karier, dan jaminan sosial. Hal ini meningkatkan



motivasi dan produktivitas kerja, serta memperluas kesempatan untuk akumulasi keterampilan. Kajian oleh (McKenzie, 2017) di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan formal berpengaruh positif terhadap keputusan rumah tangga untuk berinvestasi pada pendidikan anak dan kesehatan keluarga.

Hubungan timbal balik antara kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi juga terlihat dalam transisi demografis. Negara-negara yang berhasil mengelola bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan investasi pada pendidikan akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (Bloom dkk., 2003). Sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja rendah dan kualitas SDM stagnan, maka pertumbuhan ekonomi menjadi tidak inklusif dan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, (A. Suryahadi dkk., 2009) menemukan bahwa daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang merata menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan inklusif untuk mendorong peningkatan SDM.

Kesimpulannya, terdapat hubungan yang erat dan saling memperkuat antara penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM. Penyerapan tenaga kerja yang produktif memperkuat pertumbuhan ekonomi dan membuka ruang bagi peningkatan SDM. Sebaliknya, SDM yang berkualitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang.



2.2.7. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan dua variabel utama dalam dinamika pembangunan suatu negara. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kompleks: pertumbuhan ekonomi menciptakan kapasitas fiskal dan peluang bagi peningkatan kualitas SDM, sementara SDM yang berkualitas menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Narasi ini akan membahas hubungan tersebut berdasarkan teori ekonomi dan diperkuat oleh temuan-temuan empiris dari berbagai studi internasional dan domestik.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ditentukan oleh akumulasi faktor produksi, termasuk tenaga kerja, modal, dan teknologi. Namun, pendekatan ini mulai bergeser sejak munculnya teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran modal manusia sebagai determinan utama pertumbuhan. Romer (1990) menjelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan manusia berperan sebagai sumber inovasi dan produktivitas, dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang bersifat *self sustaining*. Becker (1993) melalui pendekatan *Human Capital Theory* juga menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi produktif yang menghasilkan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dari sisi empiris, (Barro, 2001) menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata tahun sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Negara-negara dengan tingkat pencapaian pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang

gi pula. Studi oleh Hanushek & Woessmann (2008) mengonfirmasi bahwa
 anya jumlah tahun sekolah, tetapi juga kualitas pendidikan, yang



berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menekankan bahwa kemampuan kognitif, yang tercermin dalam hasil ujian matematika dan sains, memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi menciptakan kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara, yang kemudian dapat dialokasikan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Ketika PDB meningkat, penerimaan pajak pun naik, memungkinkan pemerintah membiayai layanan sosial yang berkualitas. Dalam laporan IMF (2018), dijelaskan bahwa negara-negara dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas SDM secara merata.

Namun, pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak positif terhadap SDM jika tidak disertai dengan pemerataan. Dalam pendekatan *Inclusive Growth*, ditekankan pentingnya pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok atas. Di negara berkembang kerap mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai peningkatan signifikan dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peran kebijakan publik sangat penting dalam memastikan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas SDM.

Dalam konteks Indonesia, data dari Bappenas (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang konsisten cenderung diikuti oleh peningkatan



Namun, daerah dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi mengalami dalam capaian SDM. Misalnya, provinsi dengan sektor pertambangan

yang mendominasi PDRB sering kali menunjukkan ketertinggalan dalam indikator pendidikan dan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraktif tidak secara otomatis menghasilkan kualitas SDM yang tinggi.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan efek tidak langsung terhadap kualitas SDM melalui pasar tenaga kerja. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, dan terjadi peningkatan upah riil. Pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi memungkinkan peningkatan konsumsi gizi, kesehatan, dan pendidikan. (McKenzie & Rapoport, 2011) dalam studi mereka menunjukkan bahwa rumah tangga yang berada dalam ekonomi yang bertumbuh cenderung meningkatkan investasi dalam pendidikan anak mereka.

Namun demikian, kualitas pertumbuhan menjadi kunci utama. Jika pertumbuhan hanya didorong oleh sektor informal dan berproduktivitas rendah, maka dampaknya terhadap SDM akan terbatas. World Bank (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penciptaan lapangan kerja formal dan produktif memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan SDM dibanding pertumbuhan yang tidak inklusif.

Kesimpulannya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM bersifat timbal balik dan bergantung pada struktur pertumbuhan, distribusi pendapatan, serta efektivitas kebijakan publik. Pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, namun hal ini hanya terwujud jika pertumbuhan tersebut dikelola secara inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia. Oleh karena itu, integrasi antara strategi ekonomi makro dan kebijakan pengembangan SDM

syarat utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan



2.3. Tinjauan Empiris

Berikut adalah beberapa tinjauan empiris yang dipetakan berdasarkan variabel fiskal stres, ketergantungan fiskal, inflasi, upah, investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, sebagai berikut:

2.3.1. Fiskal Stres, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kajian empiris mengenai hubungan antara fiskal stres, investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan SDM menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah penelitian menemukan bukti positif. (Paddu dkk., 2024) dalam kajian BRICS bahkan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi energi, mendorong investasi produktif, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi dan SDM. Demikian pula, (Akai & Sakata, 2002) di Amerika Serikat menemukan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan melalui optimalisasi belanja dan pendapatan daerah, sementara (Easterly & Rebelo, 1993) menyatakan bahwa tekanan fiskal dapat berdampak positif apabila diarahkan pada infrastruktur produktif. Studi lokal di Bali oleh (Krisnawati & Elly, 2022) juga menegaskan bahwa fiskal stres masih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika disertai peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Lugastoro & Ananda (2012) dalam kajian tentang fiskal (PAD dan TKDD) terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol memberi temuan bahwa PAD dan DAK sebagai unsur TKDD berdampak positif pada kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap SDM.

ya, (Marbun, 2010) yang melihat kapasitas fiskal terhadap IPM di a, (Saputra & Mahmudi, 2012), serta (Sofilda dkk., 2023) dalam konteks



Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas SDM, selaras dengan (Kurniadi, 2023) yang mengkaji tentang Fiskal (PAD, transfer) dan investasi terhadap IPM di Kalimantan Barat menemukan bahwa fiskal dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi IPM. Dalam skala internasional, (Jin & Jakovljevic, 2023b) menggunakan data panel lintas 50 negara tahun 1991-2020 menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Indeks IPM meskipun sifatnya non linear, terutama kuat pada level rendah dan menengah.

Dari sisi investasi, bukti empiris juga mendukung bukti positif fiskal dengan investasi (Gong dkk., 2022) meneliti di Tiongkok tahun 2014-2019, (Makmur dkk., 2025) meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada investasi di Indonesia, menemukan bahwa fiskal stres tidak selalu berdampak kontra terhadap perekonomian. Dalam kondisi tertentu, tekanan fiskal justru mendorong pemerintah lebih fokus pada belanja produktif yang memperbaiki iklim usaha dan menciptakan efek *crowding in*. Hal ini memberi peluang bagi investasi swasta untuk tumbuh karena adanya penurunan biaya transaksi dan peningkatan daya tarik pasar.

Lebih lanjut, (Hamsari dkk., 2021), dalam studinya di Kota Samarinda selama periode tahun 2003-2017 dengan melihat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran sektor kesehatan justru berpengaruh negatif, dan investasi swasta

ik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pada unan manusia, pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap



IPM, sementara pengeluaran kesehatan tidak berpengaruh, serta investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan. Melalui mekanisme tidak langsung, pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, pengeluaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan melalui pertumbuhan ekonomi, dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi sendiri justru berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM.

Kemudian, (Amalia, 2022) dalam kajian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesempatan kerja terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 menggunakan regresi data panel dengan alat analisis *evIEWS*, hasilnya menemukan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan sebagai bagian dari fiskal dan kesempatan kerja berdampak positif terhadap peningkatan IPM di Indonesia. Dari sisi lain, terdapat kajian yang menekankan bahwa untuk meningkatkan IPM di Indonesia harus dilakukan oleh faktor-faktor non ekonomi yaitu pentingnya pendidikan seperti yang dikaji oleh (Achmad & Hamzani, 2015) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2008-2012 dengan menggunakan *path* analisis dan AMOS.

Di sisi penyerapan tenaga kerja, (Heidarian dkk., 2023a) dalam kajian efek ambang batas indeks stres fiskal regional terhadap ketenagakerjaan di 31 provinsi di Iran pada tahun 2005-2017 menggunakan regresi panel menemukan bahwa tekanan fiskal awal dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, tetapi ketika akumulatif melebihi ambang batas, efeknya berbalik menurunkan lapangan kerja. Selain itu, lemahnya pengelolaan fiskal daerah memicu efek limpahan berupa arus keluar modal dan migrasi tenaga kerja yang pada akhirnya menekan

lahan ekonomi. Sementara itu (Battaglini & Coate, 2016a) melihat dampak fiskal dari sisi teori ekonomi politik terhadap dunia kerja, hasilnya jika



terjadi guncangan negatif pada sektor swasta maka akan berdampak pada pelemahan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini sejalan dengan pandangan makroekonomi bahwa kontraksi sektor swasta menekan permintaan tenaga kerja, sehingga mengurangi kesempatan kerja yang tersedia dan berujung pada meningkatnya pengangguran terbuka.

Lebih lanjut (Monacelli dkk., 2010a) dalam kajian di Amerika tentang fiskal dan dunia kerja, diperoleh hasil bahwa belanja pemerintah terbukti mendorong pertumbuhan *output* sekaligus memperbesar penyerapan tenaga kerja, suatu efek yang lebih dapat dijelaskan oleh kerangka *New Keynesian* dengan asumsi kekakuan harga dibanding model neoklasik. Selain itu, (Sulaeman & Silvia, 2019) dalam kajian tentang fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyatakan lewat hasil temuannya bahwa PAD yang merupakan indikator fiskal stres dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara dalam kajiannya tentang pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan IPM di Provinsi Riau, (Dewi dkk., 2017) menunjukkan pertumbuhan ekonomi memberi dampak positif pada kualitas SDM.

Berbeda dengan kajian positif di atas, terdapat beberapa literatur empiris yang menunjukkan dampak negatif. Davoodi dan Zou (1998) melalui studi lintas negara menemukan bahwa desentralisasi fiskal di negara berkembang sering kali berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi akibat kelemahan institusional. Kajian oleh (Carvelli, 2023a) tentang dampak panjang pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di 28 negara OECD pada tahun 199-2019 dengan menggunakan estimasi versi ECM dari model CS-ARDL diperoleh bukti yang kuat tentang pengaruh negatif jangka panjang dan jangka pendek belanja pemerintah

ndikator fiskal terhadap investasi swasta. (Alifia & Khusaini, 2024) yang tentang pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap IPM melalui



pertumbuhan ekonomi daerah di Yogyakarta menemukan bahwa fiskal dalam hal ini anggaran sektor pendidikan memberi dampak negatif terhadap kualitas SDM melalui pertumbuhan ekonomi, sementara investasi juga memberikan dampak buruk bagi peningkatan kualitas SDM.

Lebih lanjut (Reviane, 2017b) dalam kajiannya tentang pengaruh media inflasi terhadap pengaruh liberasi perdagangan dan belanja pemerintah terhadap kesejahteraan dengan menggunakan data tahun 1986-2015 dengan metode *library research* menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan melainkan melalui inflasi sebagai jalur mediasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas belanja publik sangat ditentukan oleh stabilitas makro yang mengiringnya.

Dalam studi yang dilakukan oleh (Gupta dkk., 2005) tentang dampak konsolidasi fiskal bagi pertumbuhan ekonomi dengan sampel 39 negara berpenghasilan rendah, diperoleh hasil bahwa fiskal stres tidak selalu berdampak negatif; jika dikelola dengan baik melalui pembatasan belanja rutin dan perlindungan investasi publik, tekanan fiskal justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, fiskal stres berpotensi menjadi katalis pembangunan dan peningkatan kualitas SDM ketika ditopang tata kelola yang efektif.

Selaras dengan ini, (Dreger & Reimers, 2016a) dalam kajian di Kawasan Eropa tentang apakah investasi publik dapat menjadi stimulan bagi investasi swasta, ditemukan hasil bahwa investasi publik sebagai sub set pengeluaran fiskal yang bila tidak dikembangkan dengan baik akan menimbulkan tekanan fiskal sehingga membatasi investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan (Nwosa & Akinbobola, 2016b) dalam kajian antara tahun 1970-2013 tentang peran

ekonomi makro dan arus masuk modal terhadap pertumbuhan ekonomi
menemukan bahwa kebijakan ekonomi makro memainkan peran



fundamental bagi pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Artinya bahwa tanpa kebijakan ekonomi makro yang tepat dalam hal ini pengelolaan anggaran negara, pengendalian inflasi, suku bunga, kurs, dan investasi publik, pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai atau tidak berkelanjutan.

Bahkan, dalam skala global, (Mittnik & Semmler, 2013) menunjukkan bahwa krisis fiskal berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di negara-negara maju dari Amerika, Inggris dan negara besar zona eropa. Dampak negatif juga muncul pada aspek pembangunan manusia: Gupta dkk. (2002), Reinhart & Rogoff (2010), dan Woo (2009) menemukan bahwa tekanan fiskal sering memaksa pemotongan belanja pendidikan dan kesehatan, yang berdampak buruk pada SDM. Kasal (2022) juga menyatakan bahwa tekanan fiskal memperlemah aktivitas ekonomi dan meningkatkan beban utang, sehingga membatasi ruang fiskal pembangunan manusia. Lebih jauh, Dewi dkk. (2017) menemukan bahwa investasi dapat pula berdampak negatif terhadap kualitas SDM, terutama bila tidak diarahkan ke sektor produktif yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, hasil positif dan negatif bahkan sejumlah penelitian justru menemukan hubungan yang tidak signifikan atau bergantung pada konteks tertentu. Zhang & Zou (2001), misalnya, menemukan hasil berbeda: desentralisasi fiskal berpengaruh negatif di China tetapi positif di India. Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif antara investasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM. Namun, ketika semua jalur tersebut digabungkan dalam model mediasi penuh, pengaruhnya tidak selalu signifikan, yang menunjukkan bahwa kekuatan jalur tidak langsung sangat bergantung pada kondisi struktural masing-masing daerah.



Secara umum, tinjauan empiris ini menegaskan bahwa hubungan fiskal, investasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM tidak bersifat linier maupun universal, melainkan sangat kontekstual. Pada banyak negara berkembang, fiskal stres cenderung berdampak negatif melalui jalur ekonomi murni. Namun, ada pula konteks seperti Indonesia atau negara BRICS di mana desentralisasi fiskal yang terkelola dengan baik justru berfungsi positif bagi peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, tata kelola transfer, serta kualitas belanja publik dalam mengarahkan dana ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2.3.2. Ketergantungan Fiskal, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kajian empiris mengenai keterkaitan antara kebijakan fiskal, investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah penelitian mengonfirmasi pengaruh positif, negatif bahkan ketiadaan pengaruh.

Studi yang dilakukan oleh Risamasu dkk. (2024b) dalam kajian tentang kebijakan fiskal terhadap peningkatan IPM di Provinsi Papua menemukan bahwa dana transfer pusat sebagai indikator ketergantungan fiskal berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM di Papua. Kemudian (Baldacci dkk., 2008a) dengan menggunakan data panel dari 118 negara berkembang pada tahun 1971-2000 untuk melihat fiskal dalam indikator belanja sosial dan modal manusia dan pertumbuhan di negara berkembang menemukan bahwa fiskal dalam hal ini pendidikan dan kesehatan berdampak positif pada modal manusia



sehingga mendukung pertumbuhan. Selain itu intervensi kebijakan seperti peningkatan tata kelola juga dapat mencapai hasil serupa.

Kajian oleh (Sawadogo, 2024) dalam risetnya pada 100 negara maju dan berkembang selama tahun 1990-2019 dengan menerapkan metode penyeimbang entropi, terungkap bahwa penerapan aturan fiskal secara signifikan meningkatkan investasi sektor swasta. menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal mampu mendorong investasi swasta. (Aprilia, 2016) dalam telaah empiris yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder tahun 2000-2014 dengan metode OLS dibantu program SPSS menemukan hasil bahwa fiskal dan moneter berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. (Fetria, 2023) mengkaji tentang desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2019, menggunakan data panel 3 kota dan 7 kabupaten dengan analisis jalur, ditemukan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kemudian, (Kusuma & Anwar, 2023) dalam penelitiannya yang dilakukan di 35 kabupaten/kota di JawaTengah dari tahun 2017-2-22 menemukan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Wijaya dkk., 2015), menganalisis tingkat ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi tahun 2008-2013 menemukan bahwa tingkat ketergantungan fiskal dengan menunjukkan korelasi yang sempurna dan ke arah positif.

Pengaruh tenaga kerja dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM dikaji oleh (Daniati dkk., 2022) dengan menggunakan an kuantitatif asosiatif, dengan data sekunder *time series* 2010-2019, ilisis jalur dibantu program SPSS versi 23, diperoleh hasil bahwa investasi



tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh positif terhadap kualitas SDM, sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kualitas SDM. Sementara investasi terhadap kualitas SDM melalui pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh pada periode penelitian.

Selanjutnya, investasi swasta terbukti memperkuat kualitas manusia. Dalam studi yang dilakukan oleh (Asiri, 2016a) yang melihat belanja modal dan investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2003-2013, diperoleh hasil bahwa belanja modal yang merupakan indikator fiskal dan juga investasi swasta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja sebagai variabel mediasi.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, (Nurhidayat dkk., 2023), dalam kajian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap IPM di Kota Palangka Raya pada tahun 2017-2022 dengan menggunakan regresi linier berganda, diperoleh hasil pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas SDM di kota Palangka Raya. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas SDM dapat dijelaskan oleh sifat pertumbuhan yang tidak inklusif.

Selanjutnya (Lumbantoruan & Hidayat, 2014), dalam studinya untuk melihat hubungan jangka Panjang antara pertumbuhan ekonomi dan IPM pada provinsi-provinsi di Indonesia periode 2004-2011 dengan menggunakan tipologi Klasen. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, dalam

anjang IPM juga ikut terdorong naik, dan sebaliknya jika pertumbuhan , kualitas pembangunan manusia juga tertekan. Selaras dengan temuan



ini, (Masiku dkk., 2017), dalam studi di Kabupaten Kutai Barat untuk melihat pengaruh investasi pertambangan dan tenaga kerja terhadap PDRB dan IPM, diperoleh hasil khusus PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM.

Namun terdapat juga beberapa studi-studi empiris yang menunjukkan arah negatif. (Ariansyah dkk., 2014) ingin melihat tingkat ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi pada periode tahun 2000-2010 dengan hasil bahwa tingkat ketergantungan fiskal sangat tinggi sehingga hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi melemah. Dalam studi lintas negara tentang stimulus fiskal bagi pertumbuhan lintas negara, ditemukan bahwa bantuan fiskal tidak menjamin pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan tanpa reformasi mendasar dalam tata kelola dan desain kebijakan bantuan, (Bräutigam & Knack, 2004; Rajan & Subramanian, 2008).

Pada waktu lampau studi oleh (Feldstein, 1982a) menemukan bahwa fiskal dalam hal ini pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari *aggregate demand* dapat memengaruhi investasi swasta, di mana belanja produktif mendorong *crowding in* melalui perbaikan iklim usaha, sementara pembiayaan utang berlebihan berpotensi menimbulkan *crowding out*. Selaras dengan (Moss dkk., 2006a) yang melakukan kajian di Afrika tentang paradoks bantuan institusi menemukan bahwa ketergantungan berlebihan pada bantuan eksternal dapat melemahkan akuntabilitas pemerintah dan insentif untuk memperkuat institusi, sehingga berdampak negatif pada penyediaan layanan dasar. Akibatnya, kesejahteraan dan kualitas SDM cenderung terhambat meskipun bantuan fiskal meningkat. Sejalan dengan itu, (Easterly, 2003a) dalam kajiannya menegaskan bahwa ketergantungan fiskal tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi

kualitas SDM, karena bukti empiris menunjukkan hubungan yang



cenderung netral atau bahkan negatif akibat lemahnya insentif kelembagaan dan terbatasnya efektivitas belanja publik.

Selain hasil positif dan negatif, terdapat pula temuan yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Dalam studi yang dilakukan oleh (Digdowiseiso & Satrio, 2022) pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data tahun 2014-2020 dan metode regresi data panel dibantu alat analisis STATA/MP V16, ditemukan bahwa rasio ketergantungan fiskal tidak berpengaruh terhadap kualitas SDM. Selaras dengan itu, (Maulana, 2023) yang mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan data *time series* tahun 2021-2022 dan data *cross section* 24 kabupaten/kota, menemukan bahwa ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM..

Dengan demikian, hubungan antara ketergantungan fiskal dan kualitas SDM bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kondisi makroekonomi, dan struktur ekonomi masing-masing daerah dan terhadap investasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM sangat ditentukan oleh tata kelola. Jika dikelola disiplin dan produktif, hasilnya positif bagi pembangunan manusia, tetapi tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, dampaknya cenderung kontraproduktif.

2.3.3 Inflasi, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kajian empiris mengenai inflasi menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian menegaskan arah negatif, terutama ketika inflasi berada pada tinggi dan tidak terkendali. Studi empiris oleh (Pangesti & Susanto, 2018)



yang mengkaji tentang pengaruh inflasi terhadap IPM di Indonesia untuk tahun 2000-2015 menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan kualitas SDM. Artinya inflasi yang tidak terkendali membuat peningkatan kualitas SDM terhambat karena menggerus daya beli dan mengurangi investasi rumah tangga maupun pemerintah dalam layanan dasar.

(Pindyck & Solimano, 1993a) mengkaji tentang ketidakstabilan ekonomi dan investasi agregat, temuan empiris menunjukkan bahwa inflasi merupakan variabel makro paling penting dalam menjelaskan ketidakpastian investasi. Meskipun ketidakpastian terbukti berpengaruh terhadap investasi, besarnya pengaruh relatif moderat; faktor yang paling menentukan perbedaan pola investasi antarnegara, khususnya di negara berkembang, adalah tingkat inflasi.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh (Khan & Ssnhadji, 2001a) melihat tentang efek ambang batas dalam hubungan antara inflasi dan pertumbuhan menemukan terdapat hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara (Rofii & Ardyan, 2017a) dalam studi tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menemukan bahwa inflasi yang sangat rendah atau deflasi juga berdampak buruk karena memicu rigiditas upah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan kajian di atas, (M. Kurniawan dkk., 2025), dalam studi empiris tentang pengaruh FDI, keterbukaan perdagangan dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN pada tahun 2014-2023 menggunakan regresi data panel, dengan hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi empiris yang menemukan hasil berbeda juga ditemukan dalam beberapa kajian. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil positif, terutama ketika berada pada level rendah dan stabil. (Yuliana dkk., 2023) yang meneliti pengaruh utang luar negeri, investasi langsung dan inflasi terhadap



pertumbuhan ekonomi di 7 negara ASEAN periode 2012-2020 menggunakan data sekunder, menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Byrne & Davis, 2005) dalam studinya tentang investasi dan ketidakpastian di G7 menemukan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat bagi masuknya investasi swasta di negara-negara G7.

Sejalan dengan studi-studi sebelumnya, (Meiditambua dkk., 2023) melakukan kajian tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dari perspektif Indonesia dengan menggunakan sekunder dari *trading economics* juga menyimpulkan bahwa inflasi dapat berdampak positif pada perekonomian jika berada pada tingkat moderat, namun berubah negatif ketika mencapai level tinggi. Di Jawa Barat, (Suprpto dkk., 2022), menganalisis pengaruh konsumsi masyarakat, inflasi dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2015-2020 dengan metode kuantitatif, di mana hasil menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Dwi & Pasaribu, 2023) mengkaji tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan data *time series* menggunakan uji analisis regresi dengan alat bantu SPSS, menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan (Jyanthi & Arka, 2019) mengkaji pengaruh investasi, ekspor dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, dengan menggunakan data sekunder dan analisis jalur, di mana hasil menemukan bahwa inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, sedangkan inflasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan dan jika pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

mampu memediasi inflasi terhadap kesejahteraan dengan arah γ bersifat negatif.



Di luar temuan positif dan negatif, terdapat pula bukti empiris yang menunjukkan pengaruh inflasi tidak signifikan. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Rahayu dkk., 2017a) untuk melihat pengaruh jumlah penduduk, inflasi dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dengan menggunakan data panel tahun 2003-2024 dengan model persamaan struktural (SEM), dan hasil menemukan bahwa inflasi dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan ini, (Nujum & Rahman, 2019), mengkaji tentang pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, menggunakan data *time series* 2008-2017, dengan analisis regresi linier berganda, menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh dari inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, (Hartati, 2020a) melakukan studi empiris tentang inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2010-2016, hasil menemukan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena faktor konsumsi, investasi dan ekspor lebih dominan dan inflasi relatif terkendali oleh kebijakan pemerintah. (Christiani & Projo, 2022), dalam studinya tentang analisis determinan pertumbuhan ekonomi di NTT tahun 2010-2021 dianalisis dengan regresi linier berganda, diketahui bahwa inflasi walaupun memiliki arah hubungan positif tetapi signifikansinya menunjukkan tidak berpengaruh. Selaras dengan hasil temuan tersebut, (Putri & Nailufar, 2022) yang mengkaji pengaruh bonus demografi, pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, menggunakan data sekunder dari tahun 2000-2021, menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain variabel

kan sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dalam wilayah dan ang diteliti.



Dalam kaitannya dengan SDM, (Kiha dkk., 2021b) melihat pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap IPM di Provinsi NTT pada tahun 2000-2019, menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 20, menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kualitas SDM. Sementara Hanushek & Kimko (2000) juga menegaskan bahwa kualitas SDM lebih ditentukan oleh mutu pendidikan daripada fluktuasi inflasi jangka pendek. Studi Suryahadi dkk. (2014) menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dan subsidi pendidikan mampu menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar meski inflasi terjadi, sehingga inflasi tidak serta merta berdampak negatif terhadap pembangunan manusia.

Dengan demikian, literatur empiris tentang inflasi menegaskan bahwa pengaruhnya terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas SDM bersifat kompleks dan kontekstual. Inflasi tinggi konsisten melemahkan fondasi ekonomi dan pembangunan manusia, sementara inflasi rendah dan stabil dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan dan investasi. Pada saat yang sama, terdapat banyak bukti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan, terutama ketika intervensi kebijakan publik dan belanja sosial berhasil menjaga akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dampak inflasi terhadap pembangunan sangat bergantung pada tingkat inflasi itu sendiri serta kapasitas kebijakan institusional dalam mengelolanya.

2.3.4. Upah Riil, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kajian empiris mengenai upah riil telah banyak dilakukan di berbagai negara maupun di Indonesia, dengan hasil yang beragam. Upah riil kerap kali dijadikan sebagai salah satu variabel penting dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia



(SDM). Namun, temuan empiris tidak selalu konsisten; sebagian menunjukkan pengaruh positif, sebagian negatif, dan sebagian lain tidak menemukan hubungan yang signifikan.

Kajian yang dilakukan oleh (Bhattacharya dkk., 2011), dalam studi tentang hubungan antara produktivitas, upah dan produktivitas pekerja dengan menggunakan analisis data panel pada 17 industri di India periode 1973-2001, di mana hasil menunjukkan bahwa upah riil memberikan efek positif terhadap produktivitas tenaga kerja yang akan meningkatkan kualitasnya. (Izzah & Hendarti, 2021a) di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder 2010-2019, menemukan bahwa upah memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan IPM. Selaras dengan ini, (Shavira dkk., 2021), dalam kajiannya di provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018 dengan menggunakan data sekunder dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan rakyat menemukan bahwa upah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Studi yang dilakukan oleh (Ismanti, 2017) yang ingin melihat pengaruh faktor pendidikan, konsumsi protein, konsumsi kalori dan upah terhadap IPM di Indonesia pada periode 1994-2013 menemukan bahwa upah berpengaruh positif terhadap IPM di Indonesia. Kemudian, (Harjunadhi & Rahmawati, 2020) meneliti tentang pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dengan upah terhadap IPM di Indonesia tahun 2014-2018 dengan menggunakan regresi data panel, ditemukan bahwa upah berpengaruh positif terhadap IPM. (Ozturk dkk., 2020), dalam studi empirisnya ingin melihat seberapa efektif upah terhadap produktivitas

kerja di Selandia Baru pada tahun 1983-2017, dengan hasil bahwa upah upahnya berperan sangat baik dalam meningkatkan produktivitas tenaga



kerja. Dengan kata lain bahwa kenaikan gaji memberikan stimulus semangat bagi tenaga kerja karena mereka dibayar karena kualitas dan kompetensi yang menandakan kualitas SDM yang baik.

Selaras dengan temuan-temuan di atas, (Megantara dkk., 2020), dalam studinya tentang pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran dan IPM di Provinsi Bali menemukan bahwa upah berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/ kota di Provinsi Bali. (Faizin, 2021), mengkaji tentang upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan regresi data panel dengan hasil menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur.

Selanjutnya, hubungannya dengan investasi, (Deng dkk., 2022), dalam kajian di Tiongkok selama periode 1995-2019 untuk melihat bagaimana biaya tenaga kerja mendorong investasi swasta, hasil menunjukkan bahwa kenaikan biaya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap investasi swasta. (Hou dkk., 2021) melakukan kajian yang sama di Tiongkok tetapi dalam periode tahun yang berbeda yaitu 1993-2018 dengan menggunakan data panel, dan hasilnya sama bahwa investasi dipengaruhi upah riil. Kajian sama oleh (Sely, 2019), tentang pengaruh upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat suku bunga terhadap investasi di Provinsi Maluku dengan data *time series* dari tahun 1998-2018, dengan hasil bahwa upah berpengaruh positif terhadap investasi swasta di provinsi ini.

Kemudian dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja, dalam studi yang dilakukan oleh (Indradewa & Natha, 2015), tentang pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dari

1994-2013 menggunakan analisis regresi dengan bantuan eviews, hasil bahwa upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja



di Bali. Sejalan dengan temuan ini, (Lokiman dkk., 2014), yang mengkaji tentang pengaruh upah minimum dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja dan dampaknya terhadap PDRB di Kota Manado tahun 2003-2010 di mana hasil menunjukkan bahwa upah berpengaruh terhadap investasi swasta dan juga penyerapan tenaga kerja.

Sementara hasil berbeda justru ditemukan oleh (Suharto & Dharmala, 2016), yang mengkaji tentang investasi swasta, upah minimum dan pertumbuhan industri sedang dan besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten selama tahun 2002-2013 dengan model analisis regresi panel, hasil kajiannya menemukan bahwa upah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selaras dengan hasil ini, (Card dkk., 1994) yang meneliti menggunakan data panel di negara-negara bagian, menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, (Suwardi, 2021a) dalam kajiannya tentang pengaruh upah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010-2019 menemukan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil kajian ini, (Sabia, 2015), mengkaji tentang upah, produktivitas dan pertumbuhan menemukan bahwa upah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian mendapati bahwa upah tidak berkorelasi nyata dengan IPM, meskipun variabel lain seperti tenaga kerja dan PDRB tetap berpengaruh positif. (Kiha dkk., 2021b), dalam studinya di Provinsi NTT tentang pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum regional terhadap IPM, menggunakan data *time series* tahun 2000-2019 dengan analisis berganda menggunakan SPSS,

menemukan bahwa upah tidak berpengaruh dalam meningkatkan SDM. Lebih lanjut (Suwardi, 2021a) mengkaji tentang pengaruh upah minimum, PDRB dan tingkat inflasi



terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan pada tahun 2005-2019 dengan menggunakan eviews, diketahui bahwa upah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor PDRB di kabupaten tersebut.

Kemudian, temuan serupa terlihat pada penyerapan tenaga kerja, di mana kenaikan upah riil tidak otomatis meningkatkan lapangan kerja, karena faktor produktivitas dan struktur ekonomi lebih dominan, (Sakti dkk., 2021) dalam studinya tentang pengaruh PDRB dan investasi swasta serta upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data sekunder tahun 2009-2018 menggunakan analisis cob douglas dibantu alat analisis SPSS V.22. Selaras dengan ini, (Shafira, 2020) melihat tentang pengaruh PDRB, upah minimum, inflasi dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, menggunakan data panel 2010-2018, diketahui bahwa upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja tetapi PDRB justru yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di provinsi ini.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pengaruh upah riil terhadap kualitas SDM tidak bersifat linier. Efek negatif muncul dalam konteks produktivitas rendah dan lemahnya daya saing usaha, sementara efek positif terlihat ketika kebijakan upah terintegrasi dengan peningkatan produktivitas, akses layanan dasar, dan penguatan institusi. Dalam konteks ekonomi Indonesia, khususnya Kawasan Timur, hasil-hasil parsial ini memberikan petunjuk bahwa jalur positif melalui daya beli, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dapat terbuka, namun mekanisme ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan kapasitas kelembagaan daerah.



2.4 Dasar Pijakan Teori (*Standing Position*)

Penelitian ini mengambil posisi bahwa pembangunan kualitas SDM di KTI tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan sektoral, melainkan harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu melalui keterkaitannya dengan variabel-variabel ekonomi makro dan dinamika kebijakan fiskal. Dalam hal ini, variabel seperti fiskal stres, ketergantungan fiskal, inflasi, dan upah riil diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas SDM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Bertolak dari kerangka *New Keynesian Economics*, penelitian ini berpandangan bahwa intervensi fiskal berperan penting dalam menciptakan stabilitas makroekonomi dan menyediakan layanan publik strategis. Dalam situasi fiskal stres atau ketergantungan fiskal yang tinggi, kapasitas daerah untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terbatas. Hal ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga menurunkan kepercayaan pasar dan menghambat pertumbuhan sektor riil. Implikasi lanjutannya adalah melemahnya kualitas SDM akibat keterbatasan kesempatan kerja, pelatihan, dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Kerangka ini diperkuat oleh teorema desentralisasi fiskal dari Oates (1972) yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan lokal dan lebih responsif terhadap preferensi masyarakat. Dalam konteks ideal, desentralisasi fiskal akan mendorong kualitas layanan publik, termasuk di sektor

dan kesehatan, yang menjadi fondasi pembangunan SDM. Namun, Oates juga menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat



bergantung pada ketersediaan kapasitas fiskal di tingkat lokal. Jika pemerintah daerah tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup dan terlalu bergantung pada transfer dari pusat, maka desentralisasi justru dapat menciptakan distorsi kebijakan, inefisiensi belanja, dan rendahnya akuntabilitas fiskal. Dalam konteks KTI, di mana ketergantungan fiskal sangat tinggi dan tekanan fiskal terus berlangsung, kondisi ini menjelaskan kegagalan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja sosial untuk mendukung kualitas SDM.

Penelitian ini juga berdiri di atas kerangka teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990; Lucas, 1988) yang menempatkan SDM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai hasil dari akumulasi modal fisik, tetapi juga sangat bergantung pada keberlanjutan investasi dalam sektor sosial. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini juga dianalisis sebagai jalur mediasi penting yang menjembatani pengaruh tekanan fiskal terhadap kualitas SDM.

Lebih lanjut, dalam *human capital theory* (Schultz, 1961; Becker, 1964), kualitas SDM ditentukan oleh investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Di KTI, meskipun transfer fiskal dan pertumbuhan ekonomi cukup besar, kualitas SDM hanya meningkat lambat karena belanja publik banyak terserap pada kebutuhan rutin dan ketergantungan fiskal masih tinggi. Investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja, yang seharusnya menjadi jalur utama peningkatan kualitas manusia, juga lemah akibat tekanan fiskal, inflasi, serta stagnasi sektor produktif. Dengan demikian, teori modal manusia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM di KTI tidak cukup hanya dengan ekspansi fiskal

umbuhan ekonomi, tetapi harus ditopang oleh investasi swasta yang



produktif dan penciptaan pekerjaan layak. Tanpa itu, efek variabel makroekonomi terhadap SDM akan tetap terbatas dan rapuh.

Selain itu, inflasi dan upah riil digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol, berdasarkan justifikasi teoritis dari pendekatan moneter dan ekonomi tenaga kerja. Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli dan nilai riil belanja sosial, sementara upah riil yang tidak selaras dengan produktivitas dapat menciptakan inefisiensi pasar tenaga kerja dan memperburuk ketimpangan sosial. Keduanya turut menentukan kapasitas individu dalam mengakses layanan dasar dan mengembangkan potensi dirinya.

Dengan demikian, *standing position* peneliti bahwa variabel ekonomi makro bukan hanya latar eksternal, tetapi merupakan determinan aktif dalam proses pembangunan kualitas SDM. Oleh karena itu, analisis terhadap SDM di KTI perlu dilakukan dengan mempertimbangkan struktur ekonomi makro dan jalur-jalur transmisi fiskal terhadap pembangunan manusia, yang dalam hal ini mencakup investasi swasta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Posisi ini berpijak pada kombinasi kerangka teoritis yang saling melengkapi di mana intervensi fiskal *new Keynesian*, efisiensi fiskal Oates, pembangunan berbasis SDM dalam teori pertumbuhan endogen, dan pemaknaan produktivitas dalam teori modal manusia yang bersama-sama mendasari pemilihan variabel, konstruksi kerangka konseptual, dan perumusan model empiris dalam penelitian ini.

